



**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, DAN  
BELANJA DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 1998-2013**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Rendra Fahmi  
NIM 110810101084**

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, DAN  
BELANJA DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 1998-2013**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Rendra Fahmi  
NIM 110810101084**

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua saya *Drs. Moch. Cholil dan Ibu Choirus Shofifah*, yang telah memberikan kasih sayang segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Sebagai tanda terimakasih selama empat tahun telah memberikan Ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Persembahan karya tulis ini untuk Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jember dan Dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jember.

**MOTTO**

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۖ  
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ  
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ  
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۖ

○ Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, ○ dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, ○ yang memberatkan punggungmu? ○ dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu, ○ karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, ○ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. ○ Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, ○ dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Alam Nasyrah, QS.94)

Saya sukses, karena saya telah kehabisan apa yang disebut kegagalan.

(Thomas Alfa Edison)

Bersyukur merupakan cara terbaik agar merasa cukup, bahkan disaat kekurangan.  
Janganlah berharap lebih sebelum kita berusaha lebih.

(Penulis)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rendra Fahmi

NIM : 110810101084

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang Tahun 1998-2013**

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah di ajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Maret 2015

Yang Menyatakan,

**Rendra Fahmi**  
NIM. 110810101084

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, DAN  
BELANJA DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 1998-2013**

Oleh:

Rendra Fahmi

NIM 110810101084

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Badjuri M.E

Dosen Pembimbing II : Aisah Jumiati S.E., MP

**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB,  
DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN  
1998-2013

Nama Mahasiswa : Rendra Fahmi

NIM : 110810101084

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 19 Maret 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Badjuri, ME

NIP. 19531225 198403 1 002

Aisah Jumiati, SE, MP.

NIP. 19680926 199403 2 002

Ketua Jurusan,

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.

NIP. 19641108 198902 2 001

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, DAN BELANJA  
DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 1998-2013**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Rendra Fahmi  
NIM : 110810101084  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal ;

**17 April 2015**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**Susunan Tim Penguji**

1. Ketua : Drs. Agus Luthfi M.Si (.....)  
1965522 199002 1 001
2. Sekretaris : Dr. Siswoyo Hari Santosa S.E., M.si (.....)  
19680715 199303 1 001
3. Anggota : Dr. Moh. Adenan M.M (.....)  
19661031 199203 1 001
4. Pembimbing I : Drs. Badjuri M.E (.....)  
19531225 198403 1 002
5. Pembimbing II : Aisah Jumiati S.E., M.P (.....)  
19680926 199403 2 002

FOTO  
4 x 6 cm

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.  
NIP. 19630614 199002 1 001

***Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah Terhadap  
Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang Tahun 1998-2013***

**Rendra Fahmi**

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas  
Jember

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan belanja daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang tahun 1998-2013. Teknik yang digunakan untuk mengetahui variabel terikat dipengaruhi variabel bebas yaitu analisis regresi berganda dengan bantuan program komputer Eviews 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan jumlah penduduk, PDRB, dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang. Secara parsial PDRB dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah karena PDRB menggambarkan sembilan sektor hasil perekonomian, semakin meningkat perekonomian semakin meningkat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang, sedangkan belanja daerah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana akan menambah produktifitas serta profitabilitas pelaku ekonomi yang akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk mempunyai nilai yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah karena masih terdapat penduduk bebas pajak daerah. Variabel PDRB memiliki pengaruh yang dominan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang.

**Kata Kunci :** *jumlah penduduk, PDRB, belanja daerah, pajak daerah*

***Analysis of the Number of Population, Gross Domestic Regional Product, and Regional Spending on Regional Tax Revenue in District Jombang 1998-2013***

**Rendra Fahmi**

*Economics and Development Studies, Faculty of Economics, Jember University*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research was to investigate the effect of the population , Gross Regional Domestic Product, and regional expenditure of local tax revenue in the district Jombang 1998-2013. Analysis techniques to determine the effect of independent variables are dependent variables used multiple linier regression analysis by computer program Eviews 7. The result showed that simultaneously that the number of people, gross regional domestic product , and regional expenditure has a significant against local tax revenue in the district Jombang. In partial gross regional domestic product and regional expenditure influential positive and significant against local tax revenue because nine grdp sector describe the results of the economy increases the economy increases local tax revenue in Jombang, district while regional expenditure used for development of facilities and infrastructure will increase productivity and profitability economic agents that will increase the local tax revenue. The number of population it has value that is not significantly to local tax revenue because there are still inhabitant of free local taxes .Variable gross regional domestic product having influence the dominant against local tax revenue in the district Jombang. `*

**Key word:** *The number of populations, gross regional domestic product, regional expenditure, local taxes*

## RINGKASAN

**Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang Tahun 1998-2013;** Rendra Fahmi, 110810101084; 2015 : 64 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menggali semua potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan guna menciptakan kemandirian daerah. Dalam menciptakan kemandirian daerah serta melaksanakan kewajiban daerah maka diperlukan adanya sumber pendapatan/penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus dapat digali secara maksimal tetapi tetap dalam batasan peratutan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar sumber pendapatan suatu daerah yang berasal dari potensi daerah maka daerah akan lebih mudah dalam mengakomodasi kepentingan masyarakatnya. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terdapat jalur provinsi lintas tengah yang merupakan jalur aktifitas perekonomian Jawa Timur. Kabupaten Jombang terkenal dengan kota santri karena terdapat pondok pesantren yang cukup banyak. Salah satu pendapatan daerah di Kabupaten Jombang adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah di Kabupaten Jombang dibagi atas berbagai macam diantaranya adalah pajak hiburan, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak parkir, pajak reklame, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta pajak mineral

bukan logam dan batuan. Adanya sebelas sumber pajak daerah yang dimiliki pemerintah daerah tentunya Kabupaten Jombang mempunyai potensi dalam meningkatkan PAD melalui pajak daerah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat Analisis Regresi Berganda. Dimana hasil dari Analisis Analisis Regresi Berganda secara simultan variabel jumlah penduduk, PDRB, dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang dengan koefisien determinasi dari sebesar 0.957629 hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel terikat sebesar 95,76%. Secara parsial jumlah penduduk memiliki nilai probabilitas sebesar 0.6227 lebih besar dari *level of significant* ( $\alpha = 0,05$ ) maka jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini kemungkinan masih terdapat pengangguran serta penduduk yang masih bebas pajak daerah. Variabel PDRB atas dasar harga konstan dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan. Nilai koefisien determinasi dari variabel PDRB sebesar 1,951395. Nilai tersebut memiliki arti jika PDRB atas dasar harga konstan naik sebesar 1% dan variabel yang lain konstan, maka penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1,95%. Sedangkan koefisien determinasi dari variabel belanja daerah sebesar 0,237832 yang berarti jika belanja daerah naik 1% dan variabel yang lain konstan, maka penerimaan pajak daerah akan naik 0.2378%.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang Tahun 1998-2013**”. Skripsi ini disusun bertujuan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini, tentunya tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs Badjuri M.E., dan Ibu Aisah Jumiati S.E., M.P., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Dr. M. Fathorrazi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta staf edukatif dan staf administrasi;
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes dan Ibu Dr. Lilis Yuliati, S.E, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Bapak Fajar Wahyu Prianto S.E., M.E., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Ayahku Drs. Moch. Cholil dan ibuku Choirus Shofifah yang selalu menemani, dan memberikan Do'a kepada penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar;
7. Kakak kandungku Bagus Wiranata S.Pd dan Dana Christina Sari S.Pd terimakasih telah memberikan motivasi kepada penulis;
8. Sahabat-sahabatku dari kecil hingga saat ini Muhammad Harozim, Doni Setiawan, Aringga Wahyu Kurniawan, Bagja Kurnia, Zuli, Ahmad Muzakki

Mubarok dan Su'udin Jafar terimah kasih telah memberikan banyak saran dan motivasi ;

9. Teman-teman yang selalu memberikan keceriaan dan kebersamaan saat kuliah Dimas, Wawan, Putra, Edi Prasetiawan, Salindri, Evie, Tio, Dani Setiawan, Fahmi Rahmadani, Dian, Rofi, Desta, Bunga, Yohan, Henggar, Angga, Okky, dan Septian;
10. Teman-teman seperjuangan IESP angkatan 2011 terimakasih telah menjadi teman baikku selama kuliah;
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Kencong Gelombang II T.A 2013/2014;
12. Teman-teman Perum Istana Tidar B4-23 yang selama ini menjadi penyemangat dan sahabat setia selama saya ada di Jember dan selalu kompak dalam menyelesaikan masalah satu sama lain;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan hasil penulisan ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi sumber inspirasi bagi penulisan karya ilmiah yang sejenis di masa mendatang.

Jember, 24 Maret 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB.1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>BAB.2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	10
2.1.1 Teori Pertumbuhan Klasik .....	10
2.1.2 Konsep Pajak Secara Makro .....	12

2.1.3 Pendapatan Daerah .....	13
2.1.4 Pengertian Pajak .....	14
2.1.5 Pajak Daerah .....	16
2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	20
2.1.7 Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah .....	23
2.1.8 Teory Chenery dan Syrquin .....	25
2.1.9 Belanja Daerah .....	28
2.1.10 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	29
2.1.11 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	30
2.1.12 Hubungan Belanja daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	30
<b>2.2 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>31</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB.3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>3.2 Unit Analisis .....</b>	<b>36</b>
<b>3.3 Waktu dan Lokasi penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>3.4 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>37</b>
<b>3.5 Metode Analisis Data .....</b>	<b>37</b>
3.5.1 Analisis Regresi Berganda .....	37
3.5.2 Uji Statistik .....	38
3.5.3 Uji Asumsi Klasik .....	40
<b>3.3 Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>42</b>
3.3.1 Variabel Terikat .....	42
3.3.2 Variabel Bebas .....	42
<b>BAB.4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jombang .....</b>	<b>44</b>

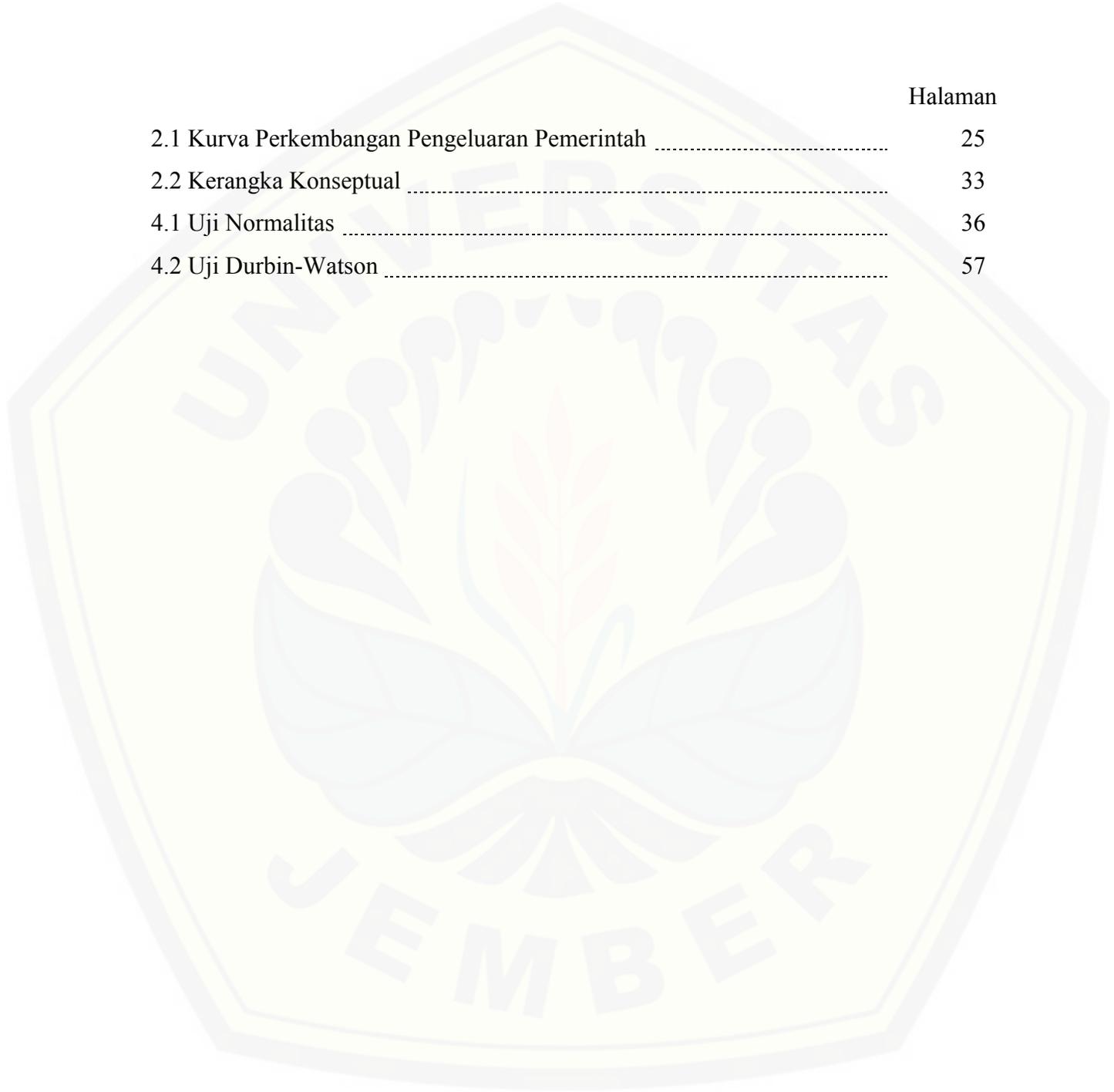
4.1.1 Kondisi Geografis .....	44
4.1.2 Kondisi Demografis .....	46
4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi .....	47
<b>4.2 Deskripsi Variabel Penelitian .....</b>	<b>48</b>
4.2.1 Penerimaan Pajak Daerah .....	48
4.2.2 Jumlah Penduduk .....	50
4.2.3 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	51
4.2.2 Belanja Daerah .....	53
<b>4.3 Hasil Analisis Data .....</b>	<b>54</b>
4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	54
4.3.2 Uji Statistik .....	56
4.3.3 Uji Asumsi Klasik .....	57
<b>4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>59</b>
4.4.1 Pembahasan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	59
4.4.2 Pembahasan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	61
4.4.3 Pembahasan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	62
<b>BAB.5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>64</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012 .....	5
1.2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2000-2010 .....	6
2.1 Cara-cara yang digunakan untuk menunjukkan corak perubahan struktur ekonomi dalam Proses pembangunan .....	26
2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	31
4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Menurut Jenis Kelamin Per-Kecamatan Akhir Tahun 2013 .....	46
4.2 Perkembangan Distribusi PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2007-2013 dalam persen (%) .....	47
4.3 Perkembangan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 1998-2013 .....	49
4.4 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012 .....	50
4.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 1998-2013 .....	51
4.6 Perkembangan Jumlah PDRB Kabupaten Jombang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Ribu Rupiah) Tahun 1998-2013 .....	52
4.7 Perkembangan Jumlah Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 1997-2012 .....	53
4.8 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda .....	54
4.9 Hasil <i>Auxiliary Regression</i> .....	58
4.10 Uji White .....	59
4.11 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang Tahun 2002-2012 .....	60

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah .....	25
2.2 Kerangka Konseptual .....	33
4.1 Uji Normalitas .....	36
4.2 Uji Durbin-Watson .....	57



**DAFTAR LAMPIRAN**

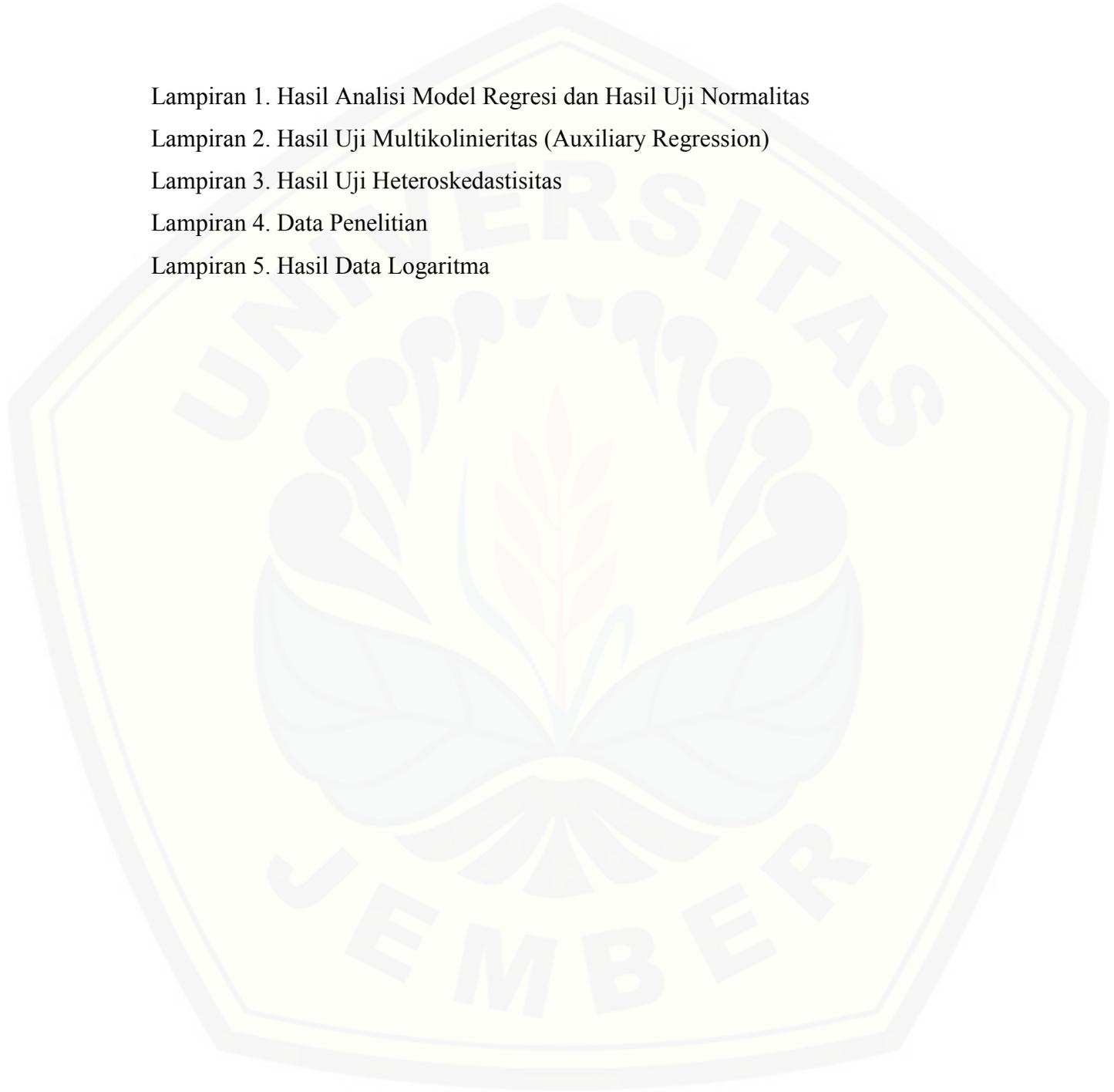
Lampiran 1. Hasil Analisa Model Regresi dan Hasil Uji Normalitas

Lampiran 2. Hasil Uji Multikolinieritas (Auxiliary Regression)

Lampiran 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 4. Data Penelitian

Lampiran 5. Hasil Data Logaritma



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan manusia, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, bagi negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki daerah masing-masing. Oleh karena itu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional berupaya untuk meratakan pembangunan beserta hasil-hasil pembangunan di daerah perlu mendapatkan perhatian sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah mengalami peningkatan (Arsyad, 1999).

Kegiatan ekonomi yang bervariasi mendorong setiap daerah Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah (Santosa & Rahayu, 2005: 9). Untuk itu pemerintah memberlakukan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108). Menurut Mardiasmo (dalam Saprudin, 2011:2) mengemukakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menggali semua potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan guna menciptakan kemandirian daerah. Dalam menciptakan kemandirian daerah serta melaksanakan kewajiban daerah maka diperlukan adanya sumber pendapatan/penerimaan daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Sudantoko (2003:83) yaitu: "Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat".

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dari penerimaan daerah terbesar khususnya pajak daerah dan retribusi daerah dalam menopang pengeluaran rutin daerah dalam melaksanakan tujuan otonomi daerah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan PAD adalah dengan mengetahui potensi-potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Tanpa mengetahui hal tersebut para elit politik serta pelaksana daerah akan kesulitan dalam mendapatkan penerimaan/pendapatan daerah untuk melaksanakan tujuan otonomi daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus dapat digali secara maksimal tetapi tetap dalam batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemandirian suatu daerah dalam kemampuannya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dapat diukur dengan tingkat ketergantungan daerah tersebut akan bantuan dari pusat. Menurut Koswara (dalam Saprudin, 2011:3) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Artinya semakin besar sumber pendapatan suatu daerah yang berasal dari potensi daerah maka daerah akan lebih mudah dalam mengakomodasi kepentingan masyarakatnya. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar. Dengan demikian, Pemerintah Daerah akan lebih mudah memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau DPRD tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan (Hamrolie, 2004:142).

Munurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dengan mengidentifikasi potensi sektor pajak daerah ditujukan untuk dapat mengoptimalkan sektor ini dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Peningkatan PAD khususnya pajak daerah suatu wilayah

tentu tidak lepas dari kondisi ekonomi suatu daerah yang terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahunnya. PDRB adalah cerminan kinerja ekonomi suatu daerah yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan PAD suatu daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggali potensi pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah kedepannya.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terdapat jalur provinsi lintas tengah yang merupakan jalur aktifitas perekonomian Jawa Timur. Jalur tersebut digunakan sebagai lalulintas perdagangan dari Kota Surabaya yang merupakan pusat perekonomian Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jombang terkenal dengan kota santri karena terdapat pondok pesantren yang cukup banyak, serta wisata religi yang terkenal yaitu makam dari K.H Mohammad Hasjim Asy'arie yang merupakan salah satu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Makam K.H Abdul Wahid Hasjim yang merupakan anak dari K.H Mohammad Hasjim Asy'arie sekaligus Menteri Agama yang pertama pada era presiden Ir. Soekarno, dan juga Makam K.H Abdurrahman Wahid yang merupakan presiden Republik Indonesia keempat yang terletak di Pondok Pesantren Tebuireng.

Salah satu pendapatan daerah di Kabupaten Jombang adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah di Kabupaten Jombang dibagi atas berbagai macam diantaranya adalah pajak hiburan, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak parkir, pajak reklame, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Adanya sebelas sumber pajak daerah yang dimiliki pemerintah daerah tentunya Kabupaten Jombang mempunyai potensi dalam meningkatkan PAD melalui pajak daerah. Berdasarkan

data DPPKAD Kabupaten Jombang tahun 2013 diketahui bahwa data pajak daerah Kabupaten Jombang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut data kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang dari tahun 2009-2012.

Tabel 1.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Besarnya Kontribusi (%)
2008	97,601,053,792	15,642,628,867	16.03
2009	90,214,137,927	17,784,228,520	19.71
2010	109,154,035,428	19,023,022,752	17.43
2011	124,799,217,856	24,705,170,574	19.80
2012	164,389,353,734	31,887,920,746	19.40

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jombang tahun 2013

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 2008-2012 selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Meski pada tahun 2009 pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang mengalami penurunan menjadi Rp. 90,214,137,927,- dari tahun sebelumnya, akan tetapi sumbangan pajak daerah tetap mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Jombang dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki khususnya pada sektor pajak daerah.

Kabupaten Jombang termasuk kedalam kabupaten yang sedang berkembang, ini dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang secara umum mengalami peningkatan serta dilihat dari PDRB Kabupaten Jombang yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. berdasarkan tabel 1.2 pada tahun 2000-2010 Kabupaten Jombang mempunyai tren positif dalam laju pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 6,12% dan laju pertumbuhan terendah sebesar 3,33% terjadi di tahun 2001. Peningkatan PDRB adalah salah satu dari dampak meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat yang kemudian akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat meningkatnya pendapatan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka kemampuan masyarakat dalam membayar pajak juga akan meningkat. Hal ini adalah salah satu peluang bagi pemerintah Kabupaten Jombang untuk menggali potensi pajak daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Jombang.

Tabel 1.2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2000-2010

No.	Tahun	PDRB ADHK 2000 (Rp. Juta)	Laju Pertumbuhan (%)
1	2000	3.825.514,17	-
2	2001	3.952.998,85	3,33
3	2002	4.109.738,16	3,97
4	2003	4.331.449,12	4,91
5	2004	4.531.339,96	5,10
6	2005	4.773.509,61	5,34
7	2006	5.047.094,89	5,73
8	2007	5.353.300,63	6,07
9	2008	5.663.243,59	5,79
10	2009	5.962.262,39	5,28
11	2010	6.327.278,13	6,12

Sumber: BPS Kabupaten Jombang 2011

Menurut Kuncoro (dalam Susanto, 2014:1) Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses serta kegiatan dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat baik dari lembaga maupun individu untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan guna menciptakan suatu lapanganpekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut, yang berarti peningkatan PDRB Kabupaten Jombang tidak lepas dari penduduk Kabupaten Jombang itu sendiri, yang mana sebagai subjek atau penggerak dari 9 sektor PDRB yaitu (1) pertanian, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) Listrik, gas, dan air bersih, (5) Bangunan/kontruksi, (6) perdagangan,

Hotel, dan Restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa.

Aktifitas penduduk dalam perekonomian tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan daerah melalui pajak, retribusi dan lain sebagainya. Menurut Norfridwitya (dalam Susanto, 2014:3) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk, besar kecilnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima akan meningkat karena adanya jumlah penduduk yang produktif dalam perekonomian. Sehingga apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan hal tersebut dapat berdampak positif pada perekonomian suatu daerah serta dalam jangka waktu tertentu juga akan memberikan dampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah

Meningkatnya aktifitas pelaku ekonomi tentu harus diimbangi dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah mengeluarkan anggarannya dalam belanja daerah atau konsumsi pemerintah. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik tentu tidak dapat berpengaruh langsung pada saat itu juga melainkan pada tahun sesudahnya. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktifitas para pelaku ekonomi. Dengan meningkatnya produktifitas para pelaku ekonomi maka akan berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang. Hal tersebut juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah karena kemampuan masyarakat dalam membayar pajak meningkat.

Oleh karena itu perlu dikaji faktor manakah yang akan dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah secara signifikan sehingga dapat dilakukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian mengenai “ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB DAN BELANJA DAERAH TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 1998-2013” perlu untuk diteliti.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang tahun pada 1998-2013?
2. Bagaimanakah pengaruh PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang tahun pada 1998-2013?
3. Bagaimanakah pengaruh belanja daerah tahun sebelumnya terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang tahun pada 1998-2013?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 1998-2013.
2. Pengaruh PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 1998-2013.
3. Pengaruh belanja daerah tahun sebelumnya terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 1998-2013.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat untuk berbagai pihak:

1. Kepentingan akademis, memberikan tambahan informasi dalam wacana akademik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu ekonomi makro sehingga dapat dijadikan referensi dan perkembangan penelitian sejenis dalam masa mendatang.
2. Kepentingan penulis, untuk mengembangkan wawasan berfikir serta menambah ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga

memperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena yang terjadi dengan dasar teori.

3. Kepentingan praktisi, diharapkan dapat membantu bagi pihak-pihak perumusan masalah serta bagi pihak pengambil kebijakan yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stock barang-barang modal, luas tanah, kekayaan alam, dan teknologi. Namun para pakar ekonomi klasik pada umumnya hanya menitikberatkan pada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada awalnya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif lebih banyak, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat akan tinggi. Maka para produsen akan mendapat keuntungan besar. Ini dapat menimbulkan adanya investasi baru yang akan berdampak pada terwujud pertumbuhan ekonomi. Pada keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus terjadi, apabila jumlah penduduk yang sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi akan dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (stationary state). Pada keadaan ini pendapatan perkapita hanya mencapai tingkat cukup untuk hidup (subsistence) (Jhingan, 2002:111).

#### a. Teori Adam Smith

Adam Smith menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis terdapat tiga aspek, yaitu (Arsyad, 1992:42)

##### 1) Pertumbuhan Output Total

Sumber alam yang tersedia (masih diwujudkan sebagai faktor produksi tanah). Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah

paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output.

## 2) Stok Barang Modal

Stok modal menurut Smith merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output, sehingga jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok. Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung, maksudnya adalah karena penambahan modal akan langsung meningkatkan output, sedangkan pengaruh tidak langsung maksudnya adalah peningkatan produktivitas perkapita yang dimungkinkan karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang semakin tinggi.

## 3) Pertumbuhan Penduduk

Menurut Smith yang sangat menentukan jumlah penduduk pada suatu masa tertentu adalah tingkat upah pada saat itu. Jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari pada tingkat upah *subsisten* (tingkat upah yang hanya cukup untuk hidup pas-pasan), maka jumlah penduduk akan meningkat. Smith juga menyatakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh stok kapital dan tingkat pertumbuhan output. Oleh karena itu jumlah penduduk akan meningkat atau menurun tergantung pada stok modal dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu.

Peranan pemerintah sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi :

- 1) Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
- 2) Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.

- 3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya jalan, dam-dam dan sebagainya.

Pemerintah membutuhkan anggaran untuk menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan mekanisme penyelenggaraannya anggaran tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencerminkan besaran, pertumbuhan, maupun struktur dari anggaran pemerintah yang dianut oleh suatu negara.

#### 2.1.2 Konsep Pajak Secara Makro

Perekonomian makro menurut Dombush (dalam Susanto, 2014:2) menjelaskan bahwa dalam ekonomi makro terdapat tiga komponen yaitu Output, Pendapatan, dan Pengeluaran. Output pemerintah Mangkoesobroto (dalam Susanto, 2014:2) yaitu pemerintah menyediakan barang atau jasa untuk keperluan publik. Dalam memenuhi keperluan publik pemerintah sangat bergantung pada besaran penerimaan pajak dari masyarakat karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah. Pengeluaran rutin yang dilakukan pemerintah setiap waktunya dalam menjalankan tujuan pembangunan ekonomi tentunya juga bersumber dari penerimaan pajak dari masyarakat.

Pendapatan yang mengutamakan penerimaan atau penambahan ekuitas dana tambahan dalam periode waktu tertentu yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu melakukan pembayaran kembali. Penerimaan tersebut antara lain; *Pertama*, pendapatan asli daerah dan perimbangan. *Kedua*, transfer dana dari daerah lainnya. *Ketiga*, lain-lain PAD yang sah (Khusaini dalam Susanto, 2014:2-3). Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 1 UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya adalah pajak daerah, retribusi, bagian laba pengelolaan asset daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### 2.1.3 Pendapatan Daerah

#### a. Pengertian Pendapatan Daerah

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Fauzi (1995:32) adalah komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan dan melancarkan roda pemerintahan. Karena itu tiap-tiap pendapatan daerah dapat dipungut seintensif mungkin.

Menurut Samudra (1995:32) pengertian Pendapatan Daerah diartikan secara luas. Sumber pendapatan daerah meliputi tidak saja Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

#### b. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 1 UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

##### 1) Pajak Daerah

Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

##### 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- 3) Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba perusahaan yang merupakan pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang dapat dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang termasuk disini adalah gedung olah raga, PDAM, kolam renang dan lain-lain.

- 4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Ini dapat berbentuk seperti hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.1.4 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2002:9) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sejak 1 Januari 1984, pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak *Official Assessment System* dalam pengumpulan pajak diganti menjadi *Self Assessment System*. Artinya perhitungan pajak tidak lagi dimulai oleh petugas pajak, tetapi oleh wajib pajak sendiri, lalu petugas pajak melakukan *crosscheck*. Perubahan sistem itu ditunjukkan untuk efisiensi dan pembatasan kuasa petugas pajak bagi peningkatan revenue dari pajak.

Sedangkan pengertian pajak menurut Brotodiharjo (1993:9), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

a. Syarat Pemungutan Pajak

Beberapa syarat dalam pemungutan pajak yang harus dipenuhi supaya dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan yaitu: (Mardiasmo, 2002:28).

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu pencapaian keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

Di negara republik indonesia, pajak diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat 3. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansii).

Sesuai dengan fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2002:23) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membayar pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Penggolongan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:56) pajak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok :

1) Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

3) Menurut Pemungutan dan Pengelolaan

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh: Pajak reklame, Pajak Hiburan.

2.1.5 Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2002:13) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis-jenis pajak daerah diantaranya:

1) Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dibagi hasilkan dengan imbalan 10% untuk Daerah Tingkat I dan 90% untuk Daerah Tingkat II.

2) Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:

- a) Pajak Hotel dan Restoran
- b) Pajak Hiburan
- c) Pajak Reklame
- d) Pajak Penerangan Jalan
- e) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- f) Pajak Pemanfaatan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Berkembangnya perekonomian serta peraturan pemerintah dengan berlakunya otonomi daerah, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

1.) Jenis Pajak Propinsi terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan dan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- 2.) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
- a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - g) Pajak Parkir

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis-jenis pajak daerah tersebut di atas berjumlah tujuh jenis pajak daerah mengalami penambahan menjadi sebelas jenis pajak. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah guna tercapainya kemandirian daerah dengan telah dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Sebelas jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 diantaranya:

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 7) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- 8) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

#### 2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). PDRB merupakan bentuk penyajian data yang bisa menggambarkan struktur perekonomian daerah pada tahun yang bersangkutan, dimana dalam PDRB terdiri dari sembilan sektor yang telah terbagi menjadi sektor pertanian, Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Minum, Bangunan, Angkutan dan Komunikasi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Serta sektor jasa-jasa.

- a. Pertanian meliputi pertanian Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan jasa pertanian.

- 1) Pertanian tanaman makanan adalah kegiatan/lapangan usaha, penyiapan pelaksanaan penanaman, pendidikan, persemaian, pemeliharaan dan pemanenan tanaman pangan.
  - 2) Pertanian tanaman lainnya meliputi tanaman perkebunan dan selain perkebunan.
  - 3) Peternakan adalah kegiatan/lapangan usaha pemeliharaan hewan ternak besar, hewan ternak kecil, unggas, ulat sutera.
  - 4) Jasa pertanian dan peternakan adalah kegiatan lapangan usaha yang meliputi pengolahan tanah, pemupukan, penyebaran bibit persemaian, penyemprotan dan pembasmian hama, penyelenggaraan irigasi, penyewaan alat pertanian.
  - 5) Perikanan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan semua hasil perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam dan keramba.
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian
- Sektor pertambangan yang dicakup disini adalah minyak bumi dan gas bumi, yodium, biji mangaan, belerang dan segala jenis hasil penggalian.
- c. Industri pengolahan adalah kegiatan/lapangan usaha pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, bahan makanan minuman dan tembakau, tekstil, barang dari kulit, barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, kertas dan barang cetakan, pupuk kimia dan barang dari karet dan barang lainnya.
- d. Listrik, gas dan air.
- 1) Listrik adalah kegiatan/lapangan usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian jaringan distribusi guna penyaluran listrik untuk dijual kepada rumah tangga, industri dan pengguna lainnya.
  - 2) Gas, uap dan air panas adalah kegiatan/lapangan usaha memproduksi dan mendistribusikan gas alam, uap dan air panas untuk dijual kepada rumah tangga, industri dan pengguna lainnya.
  - 3) Penjernihan, penyediaan dan penyaluran air adalah kegiatan/lapangan usaha penampungan, penjernihan dan pendistribusian air pada rumah tangga, industri dan lainnya.

- e. Bangunan adalah kegiatan/lapangan usaha dalam pembuatan/perbaikan pembongkaran gedung/rumah, jalan dan jembatan, bendungan dan saluran air, dermaga, pembangkit tenaga listrik, jaringan komunikasi, persewaan alat-alat konstruksi dan sebagainya.
- f. Perdagangan adalah kegiatan jual beli atas suatu barang termasuk usaha restoran, katering, cafetaria, kantin, penginapan (hotel, motel, yang menyediakan makanan).
- g. Angkutan, perdagangan dan komunikasi.
  - 1) Angkutan adalah kegiatan/lapangan usaha pengangkutan barang atau penumpang/warga dengan angkutan darat, laut, sungai dan kapal serta angkutan udara, pengepakan dan pengiriman barang, usaha persewaan alat angkutan darat, air, udara.
  - 2) Pergudangan adalah kegiatan/lapangan usaha penyiapan barang di gudang dengan fasilitas-fasilitasnya seperti penyimpanan barang dalam kamar/ruang pendingin (cold storage) di gudang-gudang barang.
  - 3) Komunikasi adalah kegiatan/lapangan usaha pelayanan komunikasi untuk umum baik melalui pos, telepon, telegram atau hubungan radio.
- h. Keuangan, asuransi termasuk usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.
  - 1) Lembaga keuangan adalah kegiatan/lapangan usaha perbankan, baik yang dikelola pemerintah atau swasta seperti bank devisa, bank tabungan, bank kredit atau bank yang melayani pemindahan cadangan uang dengan surat-surat berharga, termasuk juga usaha pegadaian, pasar modal, usaha jasa keuangan lainnya.
  - 2) Asuransi adalah kegiatan/lapangan usaha perasuransian seperti asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, konsultasi, asuransi dan dana pensiun.
  - 3) Usaha persewaan/jual beli barang, gedung dan jasa perusahaan adalah kegiatan/lapangan usaha persewaan jual-beli barang-barang tidak bergerak,

*agen real estate*, penjualan dan penafsiran nilai tanah bangunan atas dasar balas jasa/kontrak.

- i. Sektor jasa yang dicakup dalam dua sektor yaitu jasa bioskop, panggung kesenian, radio swasta dan taman hiburan. Sektor perorangan dan rumah tangga yang mencakup jasa perbengkelan, reparasi, jasa perorangan, dan pembantu rumah tangga.

Pengukuran besaran PDRB dapat dihitung melalui pengukuran arus sirkulasi (circular flow) dan pengukurannya dibedakan menjadi tiga cara yaitu metode total keluaran (the total-output method); metode pengeluaran atas keluaran (the spending on-output method); dan metode pendapatan dari produksi (the income-from-production method). Penjelasan dari masing-masing pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan sektor.
- b. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu :
  - 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
  - 2) Konsumsi pemerintah.
  - 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
  - 4) Perubahan stock, dan
  - 5) Ekspor neto dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor.

Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun), balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah

upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB selain faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung, jumlah semua komponen pendapatan ini menurut sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Produk Domestik Bruto merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

#### 2.1.7 Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Menurut teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu (Mangkoesebroto, 1991: 139-144):

##### a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi sebesar pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

##### b. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan perkapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah akan meningkat. Wagner menerangkan mengapa peran pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang mengagap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

$P_k PP$  : Pengeluaran Pemerintah per kapita

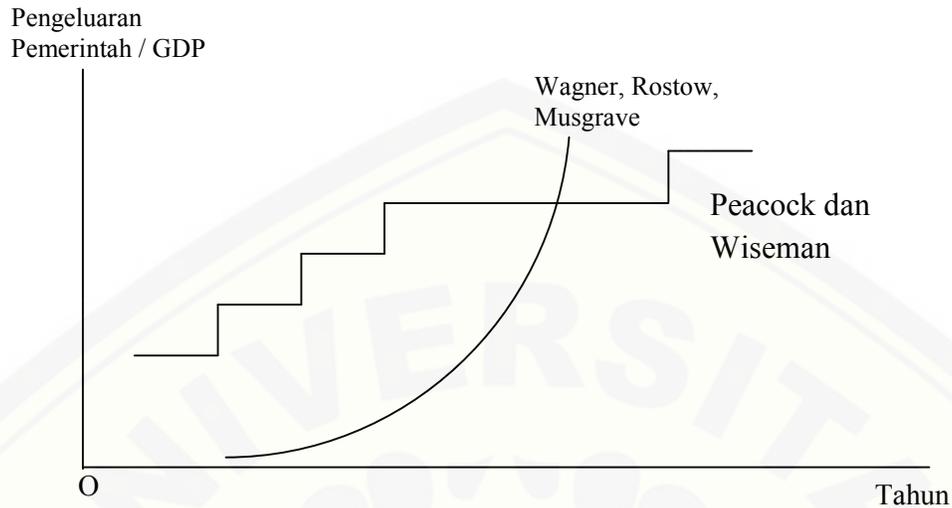
$PPK$  :Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2, ... n : Jangka waktu (tahun)

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu analisis bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman adalah perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Oleh karena itu, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis tetapi berbentuk seperti tangga sebagaimana terlihat dalam diagram berikut ini:



Gambar 2.1 : Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah  
Sumber : Mangkoesobroto (1991)

#### 2.1.8 Teory Chenery dan Syrquin

Analisis yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin lebih ditujukan pada bentuk-bentuk perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi apabila tingkat pembangunan ekonomi menjadi bertambah tinggi. Dimana mereka melihat pada corak dari sepuluh jenis perubahan dalam struktur perekonomian yang berlaku dalam proses pembangunan pada negara berkembang. Perubahan-perubahan tersebut digolongkan menjadi tiga golongan yakni : (i) perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses akumulasi; (ii) perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses alokasi sumber daya (resources) ; (iii) perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses demografis dan distribusi. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk sebagai proses akumulasi meliputi kegiatan pembentukan modal, pengumpulan tabungan pemerintah dan kegiatan menyediakan pendidikan kepada masyarakat. Sementara yang tergolong sebagai alokasi sumber daya adalah struktur permintaan domestik (pengeluaran masyarakat atas produksi dalam negeri), struktur produksi dan struktur perdagangan. Proses demografis dan distribusi

termasuk proses perubahan alokasi tenaga kerja dalam berbagai sektor, urbanisasi, tingkat kelahiran dan kematian, dan distribusi pendapatan (Sukirno, 1985:93).

Secara lengkap faktor-faktor yang dianalisis Chenery dan Syrquin untuk menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dalam proses pembangunan dan cara-cara yang digunakan untuk menunjukkan corak perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Cara-cara yang Digunakan untuk Menunjukkan Corak Perubahan Struktur Ekonomi dalam Proses Pembangunan

Faktor-Faktor yang dianalisis	Cara-cara yang digunakan untuk menunjukkan perubahan yang terjadi
<b>I. Proses Akumulasi</b>	
<b>1. Pembentukan modal</b> a. Tabungan Domestik Bruto b. Pembentukan modal domestik bruto c. Aliran masuk modal (diluar import barang dan jasa-jasa) <b>2. Pendapatan pemerintah</b> a. Pendapatan pemerintah b. Pendapatan dari pajak <b>3. Pendidikan</b> a. Pengeluaran untuk pendidikan b. Tingkat pemasukan anak-anak ke sekolah dasar dan sekolah menengah	) ) ) Dengan melihat perubahan nilai-nilainya dan dinyatakan sebagai presentase dari ) Produk Domestik Bruto (GDP) ) ) Dengan menunjukkan perubahan persentase GDP yang digunakan untuk pendidikan Dengan menunjukkan perubahan persentase anak-anak yang bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah
<b>II. Proses alokasi Sumber Daya</b>	
<b>4. Struktur permintaan domestik</b> a. Pembentukan modal domestik bruto b. Konsumsi rumah tangga c. Konsumsi pemerintah d. Konsumsi atas bahan makanan <b>5. Struktur produksi</b> a. Produksi sektor primer b. Produksi sektor industri c. Produksi perusahaan <i>utilities</i>	) ) ) ) ) Dengan melihat perubahan nilai-nilainya ) dan dinyatakan sebagai presentase dari ) Produk Domestik Bruto (GDP)

Lanjutan Tabel 2.1 Cara-cara yang Digunakan untuk Menunjukkan Corak Perubahan Struktur Ekonomi dalam Proses Pembangunan

Faktor-Faktor yang dianalisis	Cara-cara yang digunakan untuk menunjukkan perubahan yang terjadi
<b>II. Proses alokasi Sumber Daya</b>	
d. Produksi sektor jasa-jasa <b>6. Struktur perdagangan</b> a. Ekspor b. Ekspor bahan mentah c. Ekspor barang-barang industri d. Import	) Dengan melihat perubahan nilai-nilainya dan dinyatakan sebagai presentase dari ) Produk Domestik Bruto (GDP) ) ) )
<b>III PROSES DEMOGRAFIS DAN DISTRIBUSI</b>	
<b>7. Alokasi Tenaga Kerja</b> a. Dalam sektor primer b. Dalam sektor industri c. Dalam sektor jasa <b>8. Urbanisasi</b> Penduduk daerah Urban <b>9. Transisi Demografi</b> a. Tingkat kelahiran b. Tingkat Kematian <b>10. Distribusi pendapatan</b> a. Bagian dari 20% penduduk yang menerima pendapatan paling tinggi b. Bagian dari 40% penduduk yang menerima pendapatan paling rendah	) Dengan melihat perubahan jumlah dan dinyatakan sebagai presentase dari keseluruhan jumlah tenaga kerja ) Dengan melihat perubahan jumlah dan dinyatakan sebagai persentase dari keseluruhan jumlah penduduk ) Dengan melihat perubahan persentase Produk Nasional Bruto (GNP) yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan tersebut

Sumber : Chenery & Syrquin, dalam Sukirno (1985:95)

Analisis Chenery dan Syrquin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Negara-negara berkembang yang dalam uraiannya adalah kenaikan pendapatan salah satu ciri-cirinya merupakan perubahan struktur permintaan domestik dalam hal ini adalah peningkatan konsumsi pemerintah. Kesimpulannya tingkat pengeluaran pemerintah dalam hal pembentukan modal serta pembangunan prasarana akan berdampak pada lancarnya pembangunan ekonomi sehingga penerimaan pemerintah juga ikut meningkat (Sukirno, 1985).

### 2.1.9 Belanja Daerah

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rinciannya bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasar sifat dan berdasar fungsinya. Berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasar fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial.

Pada hakekatnya pengeluaran pemerintah daerah menyangkut dua hal (anggaran line item), yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran rutin, seperti pembiayaan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Misalnya untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, Angsuran pinjaman/hutang dan bunga, bantuan keuangan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak terduga.
- 2) Pengeluaran pembangunan, yaitu pembiayaan untuk pembangunan daerah sebagai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dalam sektor pertanian, industri, perhubungan, pariwisata dan sektor-sektor yang lain.

Adanya perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) diterangkan sebagai berikut :

- 1) Belanja aparatur daerah adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
- 2) Belanja pelayanan publik adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/yang dialokasikan pada atau digunakan

untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Kemudian perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) dapat diterangkan sebagai berikut:

- 1) Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak tersangka.
- 2) Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

#### 2.1.10 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Anata penduduk adalah semua orang-orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, baik yang produktif atau tidak produktif (dalam Susanto, 2014:3). Adanya aktifitas penduduk dalam suatu perekonomian akan berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah yang berupa pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Sehingga apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima juga akan meningkat karena penduduk serta adanya jumlah penduduk yang produktif didalam perekonomian (Norfridwitya dalam Susanto, 2014:3).

Dengan demikian dapat dikatakan penduduk merupakan subjek atau penggerak perekonomian dalam suatu daerah. Sehingga apabila jumlah penduduk meningkat maka aktifitas perekonomian suatu daerah juga akan meningkat dan hal tersebut tentunya akan berdampak positif pada penerimaan pajak daerah. Hal tersebut sama

halnya dengan penelitian Susanto (2014:12) yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif terhadap PAD dimana pajak daerah merupakan sub-sektor dari PAD.

#### 2.1.11 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah

PDRB merupakan jumlah semua nilai tambah barang atau jasa yang dihasilkan oleh daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Meningkatnya PDRB terjadi sebagai akibat dari meningkatnya aktifitas perekonomian di Sembilan sektor ekonomi suatu daerah. Apabila aktifitas perekonomian meningkat maka hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Menurut Miyasto (1993) Semakin meningkatnya pendapatan, jumlah kekayaan, dan besarnya pengeluaran konsumsi seseorang maka semakin tinggi tingkat kemampuan orang (wajib pajak) dalam membayar pajak (dalam Sasana, 2005: 24). Seperti halnya penelitian Supriadi (2009:533) menjelaskan bahwa setiap adanya peningkatan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

#### 2.1.12 Hubungan Belanja daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Teori Peacock dan Wiseman adalah perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Mangkoesoebroto, 1991:143). Menurut Sadono Sukirno (1994) menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Analisis yang dilakukan oleh Chenery & Syrquin mengatakan pengeluaran pemerintah dalam hal pembangunan prasarana guna melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat akan berdampak pada peningkatan

penerimaan pemerintah. Pengeluaran pemerintah sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi (Santosa & Rahayu, 2005:13). Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, maka pemerintah perlu untuk meningkatkan penerimaan pemerintah salah satunya melalui sektor pajak daerah. Seperti halnya penelitian Supriadi (2009:533) menjelaskan bahwa setiap adanya peningkatan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut rincian mengenai penelitian sejenis sebelumnya yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini dengan beberapa kategori:

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

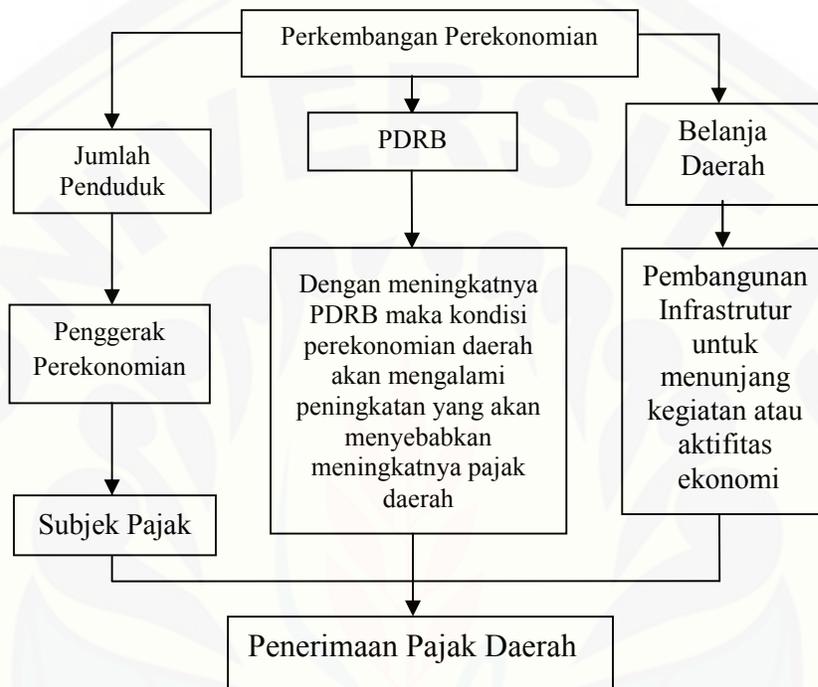
Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu (2005)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri	- Pengeluaran Pemerintah ( $X_1$ ) - Jumlah Penduduk ( $X_2$ ) - PDRB adhb ( $X_3$ )	- Faktor-Faktor yang mempengaruhi presentasi perubahan PAD adalah Total Pengeluaran Pembangunan, Jumlah Penduduk, dan PDRB dengan tingkat koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,971. - Variabel yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu Jumlah Penduduk yaitu sebesar 8,049
Hadi Sasana (2005)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)	- PDRB per kapita ( $X_1$ ) - Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ ) - Tingkat Inflasi ( $X_3$ ) - Jumlah Luas Lahan ( $X_4$ ) - Jumlah Bangunan ( $X_4$ ) - Krisis Moneter ( $D_6$ )	- Secara Parsial dan Simultan PDRB per kapita, Jumlah Wajib Pajak, Tingkat Inflasi, Jumlah Luas Lahan, dan Jumlah Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyumas. - Variabel Jumlah Banguna mempunyai pengaruh yang paling besar dengan nilai koefisien regresi sebesar 3,599 - Variabel Krisis Moneter berpengaruh negatif terhadap Pajak Bumi Bangunan

Lanjutan Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Apip Supriadi (2009)	Determinasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 1994-2005	- PDRB ( $X_1$ ) - Konsumsi Pemerintah daerah ( $X_2$ ) - Pajak daerah tahun sebelumnya ( $X_3$ )	Secara bersama-sama pengaruh PDRB, Konsumsi pemerintah, pajak daerah tahun sebelumnya dan dummy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah di Kabupaten Tasik Malaya Periode Tahun 1994-2005.
Mucholifah (2010)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto	- PDRB ( $X_1$ ) - Tingkat Inflasi ( $X_2$ ) - Investasi Industri ( $X_3$ ) - Jumlah Tenaga Kerja ( $X_4$ )	Pengaruh PDRB, Tingkat Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto.
Rifqy Sabatini dan Evi Yulia Purwanti (2012)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang	- Tingkat Hunian Kamar ( $X_1$ ) - Tarif Kamar Rata-rata ( $X_2$ ) - PDRB ( $X_3$ ) - Jumlah Wisatawan ( $X_4$ )	- Tingkat Hunian Kamar berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel yaitu sebesar 3,956 terhadap Pajak Hotel di Kota Semarang - Tarif Kamar Rata-rata berpengaruh positif yaitu sebesar 295,705 terhadap Pajak Hotel di Kota Semarang - PDRB dan Jumlah Wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Hotel di Kota Semarang
Iwan Susanto (2014)	Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998-2012)	- PDRB ( $X_1$ ) - Jumlah Penduduk ( $X_2$ ) - Tingkat Inflasi ( $X_3$ )	- Secara Bersama-sama variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Inflasi Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang - Pada Variabel PDRB dan Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. - Variabel tingkat Inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang ada dan dilatarbelakangi oleh penelitian terdahulu, maka dapat disusun perumusan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Pajak Daerah adalah salah satu sumber dari Pendapatan Asli daerah. Besarnya penerimaan pajak daerah berdasarkan atas potensi yang ada pada masing-masing daerah. Menurut teori yang ada serta beberapa hasil penelitian penelitian bahwasannya Pajak Daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel makro diatas diantaranya jumlah penduduk, PDRB, dan belanja daerah. Penduduk merupakan pelaku penggerak perekonomian suatu daerah. Penduduk sebagai subjek pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin bertambahnya penduduk sebagai pembayar pajak maka akan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Jumlah PDRB juga mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi

di wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). PDRB merupakan bentuk penyajian data yang mencerminkan tentang kondisi perekonomian daerah tersebut. Dengan meningkatnya PDRB maka pada daerah tersebut sedang mengalami peningkatan perekonomian. Meningkatnya perekonomian berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat yang kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga dapat disimpulkan meningkatnya PDRB mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi diantaranya menyediakan fasilitas serta sarana dan prasarana (infrastruktur) kebutuhan publik yang berguna untuk menunjang atau meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah menggunakan anggaran belanja (belanja daerah). Dalam hal ini pemerintah harus mampu meningkatkannya (penerimaan pemerintah) salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

#### **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan dari teori-teori yang sudah dijelaskan serta penelitian-penelitian yang terdahulu, maka Hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu:

- H<sub>1</sub> : Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang.
- H<sub>2</sub> : Diduga variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang.
- H<sub>3</sub> : Diduga variabel belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *eksplanatory research* yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun dan Sofyan, 1995:5). Variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB, dan belanja daerah. Sedangkan variabel terikatnya adalah penerimaan pajak daerah.

### 3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini untuk melihat besar penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jombang dengan jumlah penduduk, PDRB, dan belanja daerah serta mengetahui variabel manakah yang berpengaruh signifikan dan positif dalam mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Jombang pada tahun 1998 -2013.

### 3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah untuk mengamati pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jombang pada tahun 1998-2013, karena pada tahun tersebut terjadi gejolak ekonomi yaitu krisis moneter yang disebabkan hutang swasta yang tinggi dan pada umumnya bersifat jangka pendek. Serta pada tahun itu terjadi peralihan kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Desentralisasi Fiskal). Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Jombang, dengan pertimbangan Kabupaten Jombang merupakan daerah strategis yang berada dibagian tengah Provinsi Jawa Timur serta dilintasi jalan arteri primer Surabaya-Madiun. Kabupaten Jombang masih termasuk dalam daerah berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang secara umum mengalami peningkatan serta kondisi ekonominya belum begitu maju.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan dengan mengambil dari data yang sudah dipublikasikan, data yang dimaksud sudah didokumentasikan atau dipublikasikan, data tersebut adalah :

1. Tingkat penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jombang selama tahun 1998 – 2013.
2. Jumlah penduduk Kabupaten Jombang selama tahun 1998 – 2013.
3. Tingkat PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jombang selama tahun 1998 – 2013.
4. Tingkat belanja daerah Kabupaten Jombang selama tahun 1997 – 2012.

Data-data diperoleh dari BPS Kabupaten Jombang, kantor Dispenda, penelitian sebelumnya yang berhubungan, dan informasi dari internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

### 3.5 Metode Analisis Data

#### 3.5.1 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengestimasi besarnya pengaruh dari perubahan Jumlah Penduduk ( $X_1$ ), PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 ( $X_2$ ), dan Belanja Daerah ( $X_3$ ) terhadap Penerimaan Pajak Daerah ( $Y$ ) yang dapat dinotasikan secara fungsional sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (3.1)$$

Selanjutnya fungsi regresi tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma berganda dengan menggunakan logaritma natural ( $\ln$ ) sebagai berikut (Gujarati, dalam Santosa dan Rahayu, 2005:15):

$$\text{Ln}Y_t = \beta_0 + \beta_1 (\text{ln}X_1)_t + \beta_2 (\text{ln}X_2)_t + \beta_3 (\text{ln}X_3)_{t-1} + e \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana :

Y	=	Penerimaan Pajak Daerah
$\beta_0$	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi parsial untuk $X_1, X_2, X_3$
$X_1$	=	Jumlah Penduduk
$X_2$	=	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
$X_3$	=	Belanja Daerah
t	=	Tahun (time)
e	=	Error term
Ln	=	Logaritma Natural

### 3.5.2 Uji Statistik

#### a. Uji F (Uji Simultan)

Merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan atau serentak dari faktor independen terhadap faktor dependen (Supranto, 2005:142). Uji F ditujukan untuk mengukur tingkat hubungan secara keseluruhan koefisien regresi dan faktor independen dan faktor dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dengan menggunakan uji F. Rumus uji F adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Dimana :

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel

$R^2$  = Koefisien determinasi yang telah ditemukan

K = jumlah faktor independen

n = jumlah data

Perumusan Hipotesis:

- 1)  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \rightarrow$  Artinya secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  terhadap variabel  $Y$ .
- 2)  $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0 \rightarrow$  Artinya secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  terhadap variabel  $Y$

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Apabila probabilitas  $F$  hitung  $\leq$  *level of significant* ( $\alpha = 0,05$ ) dimana  $\alpha$  merupakan besar kesalahan yang ditolelir dalam keputusan maka,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- 2) Apabila probabilitas  $F$  hitung  $\geq$  *level of significant* ( $\alpha = 0,05$ ) dimana  $\alpha$  merupakan besar kesalahan yang ditolelir dalam keputusan maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen (Sipranto, 2005:141). Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi dari masing-masing variabel independen, yaitu Jumlah Penduduk ( $X_1$ ), PDRB ( $X_2$ ), dan Belanja Daerah ( $X_3$ ) terhadap Penerimaan Pajak Daerah ( $Y$ ).

Rumus yang digunakan adalah:

$$t = \frac{bi}{Se_{(bi)}}$$

Dimana :

$bi$  = Penduga bagi  $\beta$

$Se (bi)$  = standart error dari  $\beta$

Perumusan Hipotesis

- 1)  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \rightarrow$  Artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  terhadap variabel  $Y$ .
- 2)  $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0 \rightarrow$  Artinya secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  terhadap variabel  $Y$

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka,  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
- 2) Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka,  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

c. Uji R

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan besaran yang paling lazim digunakan untuk mengukur kebaikan-sui (goodness of fit) garis regresi.  $R^2$  memiliki nilai antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), apabila nilai  $R^2$  suatu regresi tersebut sebesar satu berarti suatu kecocokan sempurna sedangkan bila  $R^2$  bernilai nol maka tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan (Gujarati, 1978:45). Yang berarti bahwa keseluruhan faktor bebas secara bersama-sama mampu menerangkan faktor berikutnya bila  $R^2$  semakin mendekati satu.

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Salah satu uji normalitas faktor error adalah Jarque-Berra atau J-B test. Dengan hipotesis nol yang menyatakan bahwa error berdistribusi normal, maka kriteria keputusan adalah sebagai berikut (Universitas Diponegoro, 2011:4) : Membandingkan nilai J-B hitung dengan nilai  $\chi^2$  (2) tabel dengan aturan:

- 1) Bila nilai J-B hitung  $>$  nilai  $\chi^2$  (2) table atau nilai probabilitas  $J-B_{hitung} <$  nilai probabilitas  $\alpha=5\%$ , maka hipotesis yang menyatakan error berdistribusi normal ditolak
- 2) Bila nilai J-B hitung  $<$  nilai  $\chi^2$  (2) table atau nilai probabilitas  $J-B_{hitung} >$  nilai probabilitas  $\alpha=5\%$ , maka hipotesis yang menyatakan bahwa error berdistribusi normal diterima

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah di dalam suatu model terdapat dua atau lebih variabel yang saling berkaitan atau berhubungan linier erat yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari

model regresi (Supranto, 2004: 13). Salah satu mendeteksi keberadaan multikolinearitas di dalam suatu model adalah dengan melihat jika nilai  $R^2$  yang dihasilkan dari suatu estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (Universitas Diponegoro, 2011:6). Serta menggunakan *auxiliary regression* yaitu meregresi variabel bebas dengan variabel bebas yang lainnya yang selanjutnya dibandingkan masing-masing nilai  $R^2$  -nya. Apabila  $R^2$  dalam persamaan ini lebih besar daripada nilai  $R^2$  model awal, maka model tersebut terindikasi adanya multikolinieritas. Sebaliknya, apabila  $R^2$  dalam persamaan ini lebih kecil daripada nilai  $R^2$  model awal, maka model tersebut tidak terindikasi adanya multikolinieritas (Ariefianto, 2012: 54).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui kesalahan pengganggu dari masing-masing variabel jumlah penduduk, PDRB, dan belanja daerah saling mempengaruhi atau berkorelasi. Apabila kesalahan pengganggu dari masing-masing variabel terikat saling mempengaruhi maka terjadi autokorelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi gejala autokorelasi adalah dengan Uji Durbin-Watson dengan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut (Ariefianto, 2012: 30):

- 1)  $4 - d_l < DW < 4$  ; Ada Autokorelasi Negatif
- 2)  $4 - d_u < DW < 4 - d_l$  ; Tidak ada kesimpulan
- 3)  $2 < DW < 4 - d_u$  ; Tidak ada Autokorelasi
- 4)  $d_l < DW < d_u$  ; Tidak ada kesimpulan
- 5)  $0 < DW < d_l$  ; Ada Autokorelasi Positif

d. Uji Heterokedastisitas

Dalam analisis regresi linier berganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut bersifat BLUE adalah  $\text{var}(u_i) = \sigma^2$  (konstan), yaitu semua sesatan mempunyai variansi yang sama. Apabila  $\text{var}(u_i) \neq \sigma^2$ , maka varians bersifat heteroskedastisitas. Bila terjadi heteroskedastisitas,

penaksiran OLS tetap linier dan tidak bias, tetapi tidak lagi mempunyai variansi minimum yang terbaik sehingga penaksir-penaksir OLS menjadi tidak efisien (Universitas Diponegoro, 2014:15). Uji White ini dilakukan dengan menentukan nilai  $\chi^2 = n.R^2$ . Kriterianya adalah jika  $\chi^2$ -hitung  $>$   $\chi^2$ -tabel dengan derajat bebasnya sama dengan jumlah koefisien (termasuk konstanta) atau  $\text{Obs} \cdot R\text{-squared} < \alpha$ , maka hipotesis nol yang menyatakan adanya homoskedastitas ditolak (Universitas Diponegoro, 2011:5).

### 3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang diamati dalam penelitian ini merujuk pada literatur yang telah dibaca oleh penulis, yaitu:

#### 3.6.1 Variabel terikat (Y)

Dependen variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah merupakan jumlah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Jombang yang berasal dari setoran wajib pajak daerah kabupaten/kota. Ukuran yang dipakai adalah dengan Ribu Rupiah.

#### 3.6.2 Variabel bebas (X)

Independen variabel atau variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak bergantung pada variabel lain.

##### a. Jumlah Penduduk ( $X_1$ )

Jumlah penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kabupaten Jombang yang bertujuan untuk menetap baik yang produktif maupun tidak produktif. Ukuran yang dipakai adalah dengan Jiwa.

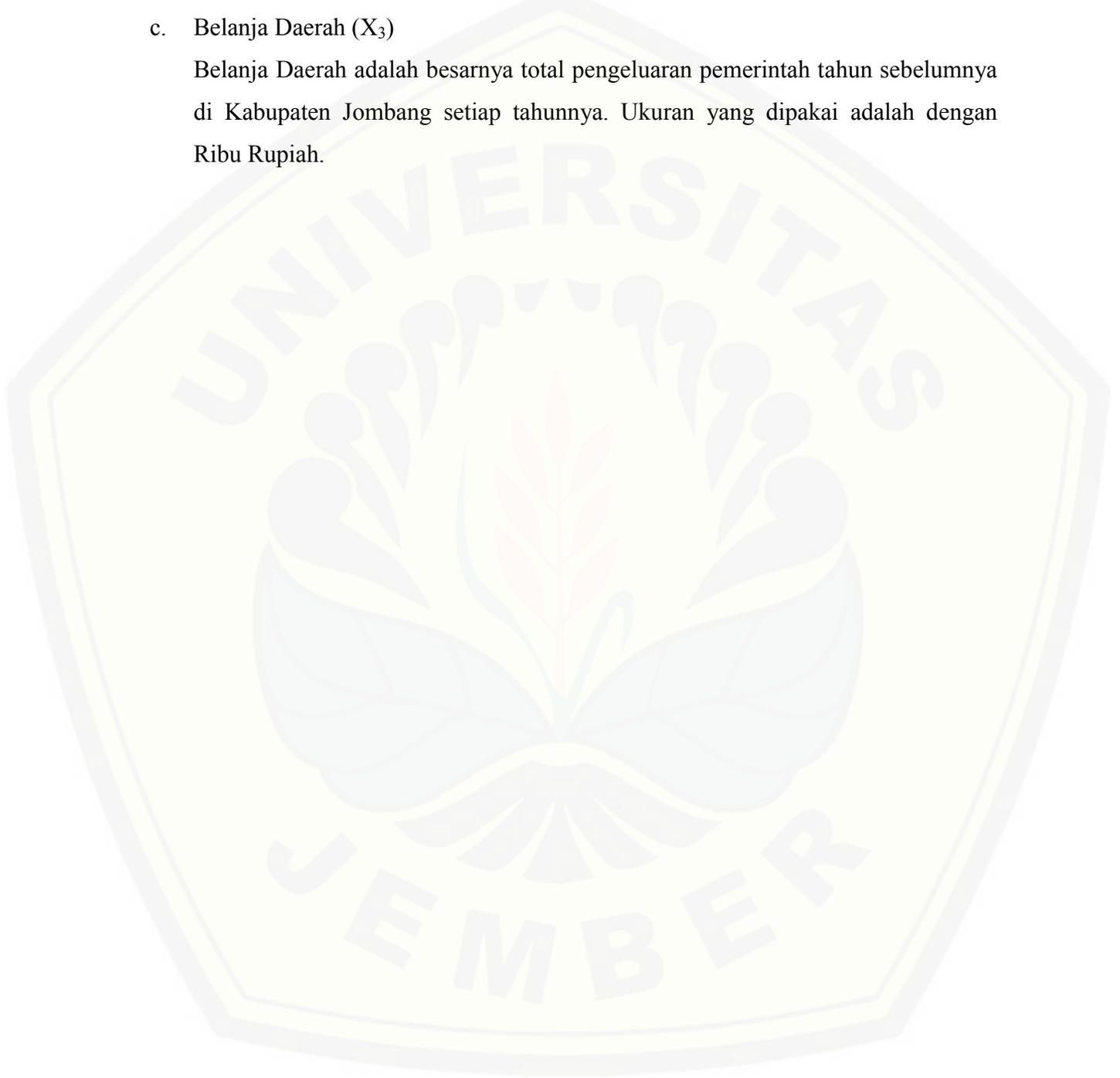
##### b. Produk Domestik Regional Bruto ( $X_2$ )

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tertentu

(satu tahun) atas dasar harga konstan 2000. PDRB ini meliputi semua sektor dan lapangan usaha. Ukuran yang dipakai adalah dengan Ribu Rupiah.

c. Belanja Daerah ( $X_3$ )

Belanja Daerah adalah besarnya total pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya di Kabupaten Jombang setiap tahunnya. Ukuran yang dipakai adalah dengan Ribu Rupiah.



## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jombang

#### 4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis, karena berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi Jalan Arteri Primer Surabaya-Madiun dan Jalan Kolektor Primer Malang-Babat. Kabupaten Jombang dibatasi oleh beberapa Kabupaten diantaranya:

Disebelah Utara	: Kabupaten Lamongan
Disebelah Selatan	: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Disebelah Barat	: Kabupaten Nganjuk
Disebelah Timur	: Kabupaten Mojokerto

Secara geografis Kabupaten Jombang terletak disebelah selatan garis katulistiwa berada antara 112° 03' 46" sampai 112° 27' 21" Bujur Timur dan 7° 20' 48" sampai 7° 46' 41" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 21 Kecamatan dan 306 desa. Wilayah Kabupaten Jombang sebagian besar berada pada ketinggian ± 350 meter dari permukaan laut, dan sebagian kecil dengan ketinggian > 1500 meter dari permukaan laut yaitu wilayah yang berada di Kecamatan Wonosalam. Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian ± 44 m diatas permukaan laut.

Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area, yaitu :

- 1) Kawasan Utara, bagian pegunungan kapur muda Kendeng yang sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan.
- 2) Kawasan Tengah, sebelah selatan sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija, karena irigasinya cukup bagus meliputi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek,

Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang dan Kesamben.

- 3) Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan, cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari darataran rendah, yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter, sementara 50,76% memiliki ketinggian 500-700 meter, dan 0,6% memiliki ketinggian >700 meter yang berada di Kecamatan Wonosalam.

Kemiringan wilayah Kabupaten Jombang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- 1) Kelerengan 0-2% meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang kecuali Kecamatan Wonosalam
- 2) Kelerengan 2-5% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan
- 3) Kelerengan 15%-40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan
- 4) Kelerengan >40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan.

Struktur tanah pada Kabupaten Jombang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor penting yang sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah, diantaranya adalah aliran sungai yang cukup besar dan material hasil letusan gunung berapi. Dimungkinkan bahwa hasil letusan Gunung Kelud terbawa arus deras sungai Brantas, kali Konto dan sungai-sungai lainnya yang mengalir dari selatan/tenggara ke utara masuk melintasi wilayah Kabupaten Jombang. Penggunaan tanah di Kabupaten Jombang didominasi oleh sawah yang mencapai 42,19 persen dari luas wilayah kabupaten, kemudian permukiman/ perumahan 24,08 persen, hutan 19,46 persen, tegal 11,62 persen dan penggunaan lainnya 2,65 persen.

#### 4.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi jumlah penduduk Kabupaten Jombang akhir tahun 2013 sebesar 1,230,881 jiwa. Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Jombang yaitu sebesar 140,480 jiwa atau 11,41% dari total jumlah penduduk Kabupaten Jombang. Jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Ngusikan yaitu sebesar 21,423 jiwa atau 1,74% dari jumlah penduduk Kabupaten Jombang.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Menurut Jenis Kelamin Per-Kecamatan Akhir Tahun 2013

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Bandar Kedung Mulyo	22,107	22,109	44,216	99,99
2	Perak	25,816	26,264	52,080	98,29
3	Gudo	25,541	26,124	51,665	97,77
4	Diwek	52,219	51,143	103,362	102,10
5	Ngoro	35,082	35,412	70,494	99,07
6	Mojowarno	44,111	43,537	87,648	101,32
7	Bareng	25,081	25,560	50,641	98,13
8	Wonosalam	15,873	15,462	31,335	102,66
9	Mojoagung	37,495	37,238	74,733	100,69
10	Sumobito	39,532	39,332	78,864	100,51
11	Jogoroto	32,439	31,995	64,434	101,39
12	Peterongan	32,447	32,847	65,294	98,78
13	Jombang	69,198	71,282	140,480	97,08
14	Megaluh	18,501	18,870	37,371	98,04
15	Tembelang	25,133	25,407	50,540	98,92
16	Kesamben	30,513	30,897	61,410	98,76
17	Kudu	14,277	14,631	28,908	97,58
18	Ngusikan	10,580	10,843	21,423	97,57
19	Ploso	19,765	19,946	39,711	99,09
20	Kabuh	19,618	20,406	40,024	96,14
21	Plandaan	17,967	18,279	36,246	98,29
Jumlah		613,296	617,585	1,230,881	99,31

Sumber : BPS Kab. Jombang 2014

*Sex ratio* merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. *Sex ratio* pada Kabupaten Jombang tahun 2013 sebesar 99,31 artinya setiap 10,000 penduduk perempuan terdapat 9,931 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk di Kabupaten Jombang pada tahun 2013 diantaranya usia 0 – 14 tahun sebesar 26,36%, usia 15 – 64 tahun sebesar 67,23%, dan pada usia lebih dari 65 tahun sebesar 6,41. Komposisi penduduk usia 15 – 64 tahun jumlahnya sangat besar, jumlah tersebut menghasilkan *dependency ratio* sebesar 48,74 yang artinya dari 100 penduduk produktif akan menanggung 49 orang yang tidak produktif. Hal ini berarti 2 orang dewasa hanya akan menanggung 1 anak-anak atau lansia (BPS Kab. Jombang, 2013).

#### 4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan tabel 4.2 terdapat empat sektor dominan dalam penyumbang PDRB Kabupaten Jombang terbesar yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang dilanjutkan pada sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa.

Tabel 4.2 Perkembangan Distribusi PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2007-2013 dalam persen (%)

No	Sektor/Sub Sektor	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
1	Pertanian	29,91	28,87	28,36	28,08	27,28	28,50
2	Pertambangan dan Penggalian	1,42	1,41	1,32	1,24	1,17	1,31
3	Industri Pengolahan	12,14	11,85	11,64	11,60	11,51	11,75
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,03	0,97	0,94	0,91	0,87	0,94
5	Bangunan	2,55	2,50	2,54	2,48	2,51	2,52
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	34,29	35,92	36,91	37,54	38,61	36,65
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,76	3,82	3,79	3,77	3,81	3,79
	a. Pengangkutan	2,24	2,09	1,97	1,90	1,83	2,01
	b. Komunikasi	1,52	1,72	1,82	1,87	1,98	1,78
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3,69	3,85	3,95	4,11	4,27	3,97
9	Jasa-Jasa	11,21	10,81	10,55	10,29	9,96	10,56
	a. Pemerintah Umum	5,66	5,26	5,14	5,04	4,84	5,19
	b. Swasta	5,54	5,55	5,41	5,25	5,13	5,38

Sumber : BPS Kab. Jombang (2014)

Sektor pertanian setiap tahunnya mengalami penurunan dalam distribusi pada PDRB di Kabupaten Jombang, pada tahun 2012 sebesar 28,08% dan tahun 2013 turun menjadi 27,28%. Hal ini berbeda pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dalam distribusi PDRB di Kabupaten Jombang. Tercatat ditahun 2012 kontribusinya sebesar 37,54% serta pada tahun 2013 naik menjadi 38,61%. Hal ini berarti telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Jombang dimana sektor pertanian tumbuh melambat dibandingkan dua sektor basis lainnya yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor industri pengolahan.

## **4.2 Deskripsi Variabel Penelitian**

### **4.2.1 Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan analisis kontribusi jumlah penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang tahun 1998-2013 pada tabel 4.3 menunjukkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang secara umum mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak daerah mengalami penurunan hanya pada 1999 dan 2000. Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang mengalami penurunan dimana pada tahun 1998 sebesar 3,222,161 pada tahun 1999 menjadi sebesar 3,150,746. Pada tahun 1999 merupakan tahun awal reformasi politik dari rezim orde baru serta pada tahun tersebut merupakan pasca insiden krisis moneter di tahun 1998. Serta pada tahun tersebut pemerintah pusat masih memegang peranan dalam mengelola daerah. Kebijakan otonomi daerah yang berlaku pada tahun 2001, dimana daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berlakunya kebijakan tersebut membuat Kabupaten Jombang dalam penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 4,325,580. Pada tahun 2001 merupakan pertumbuhan penerimaan

pajak daerah yang paling besar. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD terbesar terjadi di tahun 2006.

Tabel 4.3 Perkembangan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 1998-2013

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rp)	Pajak Daerah (Ribu Rp)	Pertumbuhan Pajak Daerah	Kontribusi
1998	15,983,918.00	3,222,161	-	20.16%
1999	15,030,165.64	3,150,746	-2.22%	20.96%
2000	13,359,845.48	2,502,988	-20.56%	18.74%
2001	23,936,810.00	4,325,580	72.82%	18.07%
2002	45,097,700.00	6,169,140	42.62%	13.68%
2003	70,114,760.00	8,831,750	43.16%	12.60%
2004	44,534,970.00	10,446,400	18.28%	23.46%
2005	48,990,310.00	11,097,760	6.24%	22.65%
2006	41,344,160.00	12,081,644	8.87%	29.22%
2007	80,438,355.31	14,171,544	17.30%	17.62%
2008	97,601,053.79	15,642,629	10.38%	16.03%
2009	90,214,137.93	17,784,229	13.69%	19.71%
2010	109,154,035.43	19,023,023	6.97%	17.43%
2011	124,799,217.86	24,705,170	29.87%	19.80%
2012	164,389,353.73	31,887,921	29.07%	19.40%
2013	185,091,678.24	36,927,594	15.80%	19.95%
Rata-rata			19.49%	19.34%

Sumber : BPS Kab. Jombang (Data diolah)

Berdasarkan analisis perkembangan beberapa subsektor penerimaan pajak daerah Kabupaten Jombang tahun 2008-2012 pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa sumbangan terbesar dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Jombang setiap tahunnya terdapat pada pajak penerangan jalan yang pada tahun 2012 mencapai Rp23,502,037,813,- dan selanjutnya adalah pajak reklame yang pada tahun 2012 mencapai angka sebesar Rp1,528,654,359,-. Pada tahun 2008-2010 subsektor penerimaan pajak daerah Kabupaten Jombang hanya terdapat enam subsektor yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan

pajak pengambilan bahan galian C. Sedangkan pada tahun 2011-2012 subsektor penerimaan pajak daerah Kabupaten Jombang bertambah seiring diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tambahan itu diantaranya adalah pajak parkir, pajak air bawah tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sehingga pada tahun 2011 dan 2012 penerimaan mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp19,023,022,905,- menjadi Rp24,705,170,575,- dan pada tahun selanjutnya meningkat sebesar Rp31,887,920,746,-.

Tabel 4.4 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012

<b>Keterangan</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pajak Hotel	73,140,000	74,190,000	76,003,000	83,837,700	117,793,200
Pajak Restoran	99,962,486	203,844,274	204,357,343	209,470,412	230,931,601
Pajak Hiburan	68,841,755	107,378,560	75,378,825	87,943,075	98,507,325
Pajak Reklame	854,205,063	860,674,645	879,783,184	967,291,723	1,528,654,359
Pajak Penerangan Jalan	14,415,829,053	16,498,141,040	17,754,633,553	20,103,126,066	23,502,037,813
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	130,650,510	40,000,000	32,867,000	-	-
Pajak Parkir	-	-	-	6,839,790	8,725,200
Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-	315,472,519	5,997,262,530
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	2,931,189,290	404,008,718
Penerimaan Pajak Daerah	15,642,628,867	17,784,228,519	19,023,022,905	24,705,170,575	31,887,920,746

Sumber: BPS Kabupaten Jombang

#### 4.2.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil analisis terhadap jumlah penduduk Kabupaten Jombang selama periode 1998-2013 pada tabel 4.4, laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Jombang selama tahun 1998-2013 berfluktuatif. Rata-rata laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Jombang adalah 0,69%. Laju pertumbuhan jumlah penduduk terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4,25%.

Sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar -6,98%. Jumlah penduduk di Kabupaten Jombang secara umum terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2009, jumlah penduduk mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah penduduk di Kabupaten Jombang sebanyak 1,285,739 jiwa kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009 yaitu menjadi 1,195,940 jiwa. Sampai tahun 2013 jumlah penduduk di Kabupaten Jombang sebanyak 1,230,881 jiwa.

Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 1998-2013

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
1	1997	1,106,438	-
2	1998	1,114,150	0.70
3	1999	1,121,721	0.68
4	2000	1,129,027	0.65
5	2001	1,135,285	0.55
6	2002	1,148,336	1.15
7	2003	1,155,449	0.62
8	2004	1,176,266	1.80
9	2005	1,199,958	2.01
10	2006	1,212,876	1.08
11	2007	1,233,279	1.68
12	2008	1,285,739	4.25
13	2009	1,195,940	-6.98
14	2010	1,205,114	0.77
15	2011	1,212,881	0.64
16	2012	1,220,404	0.62
17	2013	1,230,881	0.86
Rata-rata			0.69

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Data diolah)

#### 4.2.3 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan hasil analisis terhadap jumlah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 Kabupaten Jombang selama periode 1998-2013 pada tabel 4.5, bisa

diamati bahwa secara umum PDRB Kabupaten Jombang mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 1998 dan tahun 1999 dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 3,87%.

Tabel 4.6 Perkembangan Jumlah PDRB Kabupaten Jombang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Ribu Rupiah) Tahun 1998-2013

No.	Tahun	Jumlah PDRB (ADHK 2000)	Pertumbuhan (%)
1	1997	4,253,926	-
2	1998	3,814,071	-10.34
3	1999	3,711,738	-2.68
4	2000	3,825,514	3.07
5	2001	3,952,999	3.33
6	2002	4,109,738	3.97
7	2003	4,311,449	4.91
8	2004	4,531,340	5.10
9	2005	4,773,510	5.34
10	2006	5,047,095	5.73
11	2007	5,353,301	6.07
12	2008	5,663,244	5.79
13	2009	5,962,262	5.28
14	2010	6,327,278	6.12
15	2011	6,759,495	6.83
16	2012	7,230,304	6.97
17	2013	7,695,631	6.44
Rata-rata			3.87

Sumber: BPS Kab. Jombang (Data diolah)

Tercatat pada tahun 1998 dan 1999 PDRB Kabupaten Jombang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut Negara Indonesia mengalami krisis moneter sehingga hal tersebut berdampak pada menurunnya perekonomian Indonesia. Krisis moneter tersebut juga berdampak pada menurunnya PDRB di Kabupaten Jombang. Dimana pada tahun 1997 PDRB Kabupaten Jombang tercatat sebesar 4,253,926 ribu rupiah kemudian turun menjadi 3,814,071 ribu rupiah dengan

laju pertumbuhan -10,34% di tahun 1998 dan turun kembali pada tahun 1999 sebesar 3,711,738 ribu rupiah dengan laju pertumbuhan -2,68%. Pada tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jombang mampu bangkit dari tragedi krisis moneter tahun 1998. Tercatat pada tahun 2000-2013 PDRB Kabupaten Jombang mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan terbesar pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,97%.

#### 4.2.4 Belanja Daerah

Berdasarkan pada tabel 4.6 tercatat bahwa belanja daerah pada tahun sebelumnya di Kabupaten Jombang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan serta rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 41,37%.

Tabel 4.7 Perkembangan Jumlah Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 1997-2012

No.	Tahun	Belanja Daerah (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	1997	19,664,581.00	-
2	1998	22,201,264.00	12.90
3	1999	75,478,623.00	239.97
4	2000	81,138,464.00	7.50
5	2001	198,832,670.00	145.05
6	2002	217,438,950.00	9.36
7	2003	269,835,080.00	24.10
8	2004	364,657,200.00	35.14
9	2005	412,229,228.00	13.05
10	2006	490,976,697.00	19.10
11	2007	700,783,059.78	42.73
12	2008	835,844,210.10	19.27
13	2009	924,017,847.67	10.55
14	2010	1,001,954,919.16	8.43
15	2011	1,143,438,346.87	14.12
16	2012	1,363,382,391.75	19.24
Rata-rata			41.37

Sumber: BPS Kab. Jombang (Data diolah)

Tercatat pada tahun 1999 merupakan pertumbuhan belanja terbesar yaitu 239,97%. Hal ini disebabkan terjadinya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Jombang harus mengeluarkan dana melalui belanja daerah untuk memperbaiki perekonomian yang ada di Kabupaten Jombang. Pada tahun 2001 juga tercatat belanja daerah Kabupaten Jombang mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2001 yaitu sebesar 145,05%. Pada tahun tersebut merupakan awal berlakunya kebijakan otonomi daerah yang berarti kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 4.3 Hasil Analisis Data

#### 4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Pendugaan parameter pada penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda. Sedangkan data yang digunakan adalah data *time series* dalam kurun waktu 1998-2013. Pengolahan data *time series* dalam penelitian ini menggunakan program komputer *Econometric Views (eviews)* 7.0. dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Keterangan	Koef. Regresi	$t_{hitung}$	Prob.
Konstanta	-35.77019	-1.093047	0.2958
$\ln X_1$	1.228175	0.505070	0.6227
$\ln X_2$	1.951395	3.973342	0.0018
$\ln X_3$	0.237832	2.281531	0.0416
		$R^2$	= 0.957629
		$F_{hitung}$	= 90.40402
		$F_{prob}$	= 0.000000
		$DW_{hitung}$	= 1.562425

Sumber: Lampiran 1 (Data diolah)

Berdasarkan hasil pendugaan melalui regresi linier berganda tersebut, maka dapat disusun suatu persamaan yang kemudian akan dilanjutkan uji statistik dan uji asumsi klasik dari persamaan tersebut. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y_t = -35,77019 + 1,228175 (\text{ln}X_1)_t + 1,951395 (\text{ln}X_2)_t + 0,237832 (\text{ln}X_3)_{t-1} + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Daerah

X<sub>1</sub> = Jumlah Penduduk

X<sub>2</sub> = PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

X<sub>3</sub> = Belanja Daerah

t = Tahun (time)

Ln = Logaritma Natural

Berdasarkan model persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1)  $\beta_1 = 1,228175$ , artinya apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan 1% serta variabel PDRB dan belanja daerah sama dengan nol (konstan), maka penerimaan pajak daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,228175 %.
- 2)  $\beta_2 = 1,951395$ , hal ini menunjukkan apabila jumlah PDRB mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel jumlah penduduk serta belanja daerah sama dengan nol (konstan), maka penerimaan pajak daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,951395 %.
- 3)  $\beta_3 = 0,237832$ , artinya jika belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel jumlah penduduk serta PDRB sama dengan nol (konstan), maka penerimaan pajak daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,237832 %.

#### 4.3.2 Uji Statistik

##### a. Uji F (Uji Simultan)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan atau bersama-sama dilakukan uji F. Dari hasil estimasi regresi linier berganda pada tabel 4.7, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 90.40402 dengan tingkat probabilitas  $F_{hitung}$  sebesar 0,0000, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima karena nilai probabilitas  $F_{hitung} < level\ of\ significant$  ( $\alpha = 0,05$ ) yang artinya terdapat pengaruh yang nyata (signifikan) secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat variabel bebas yaitu jumlah penduduk, tingkat PDRB atas dasar harga konstan, dan belanja daerah secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

##### b. Uji t (Uji Parsial)

Dari keempat variabel tersebut untuk mengukur signifikansi masing-masing variabel secara individu melalui uji t-statistik diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Variabel Jumlah Penduduk ( $X_1$ ) berdasarkan estimasi regresi linier berganda pada tabel 4.7 diperoleh tingkat signifikannya sebesar 0.6227 lebih besar dari *level of significant* ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- 2) Variabel PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2000 ( $X_2$ ) berdasarkan estimasi regresi linier berganda pada tabel 4.7 diperoleh tingkat signifikannya sebesar 0.0018 lebih kecil dari *level of significant* ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- 3) Variabel Belanja Daerah Tahun Sebelumnya ( $X_3$ ) berdasarkan estimasi regresi linier berganda pada tabel 4.7 diperoleh tingkat signifikannya sebesar 0.0416 lebih kecil dari *level of significant* ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$

diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara Belanja Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

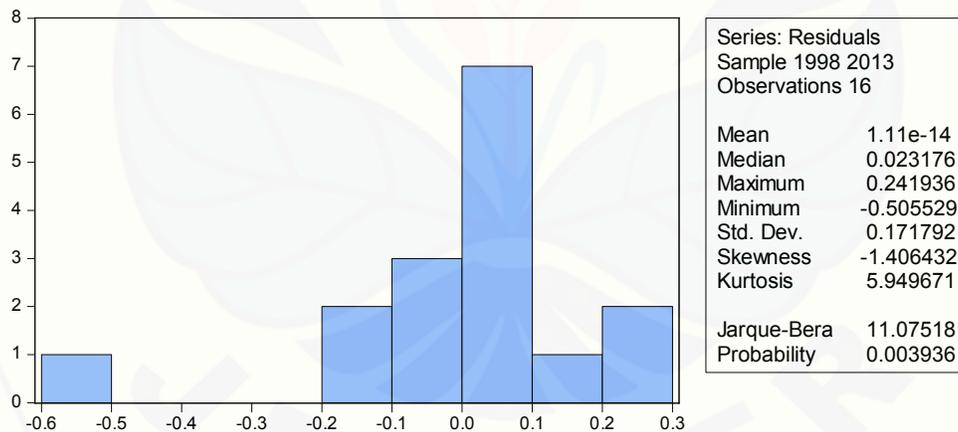
c. Uji  $R^2$  ( Uji Koefisien Determinasi)

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda pada tabel 4.7 diketahui bahwa koefisien determinasi dari persamaan tersebut sebesar 0.957629 atau 95,7629 %. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel terikat sebesar 95,7629 % sedangkan selebihnya (4,2371%) diterangkan oleh variabel-variabel diluar model yang telah diestimasi.

#### 4.3.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian Normalitas digunakan untuk melihat datanya normal atau tidak, dengan cara melihat gambar dibawah. Berdasarkan grafik uji normalitas nilai probabilitas  $J-B_{hitung}$  sebesar 0,003996 lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa data dari penelitian ini berdistribusi tidak normal.



Gambar 4.1 Uji Normalitas

Sumber: Lampiran 1

b. Uji Multikolinieritas

Salah satu mendeteksi keberadaan multikolinieritas di dalam suatu model adalah dengan melihat jika nilai  $R^2$  yang dihasilkan dari suatu estimasi model empiris

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (Universitas Diponegoro, 2011:6). Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai  $R^2$  yang dihasilkan sebesar 95,7629 % dan variabel-variabel independen yang tidak signifikan hanya satu yang tidak signifikan yaitu variabel jumlah penduduk hal ini berarti tidak adanya gejala multikolinieritas dalam model penelitian. Cara lain untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas adalah dengan *auxiliary regression* yaitu dengan meregresikan variabel-variabel independen. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil *Auxiliary Regression*

Regresi	Nilai $R^2$	Keterangan
$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_{3,t-1}$	0.957629	$R_1$
$\ln X_1 = \beta_0 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_{3,t-1}$	0.746204	$R_2$
$\ln X_2 = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_3 \ln X_{3,t-1}$	0.826054	$R_3$
$\ln X_{3,t-1} = \beta_0 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_1 \ln X_1$	0.874339	$R_4$

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan pada hasil *auxiliary regression* diketahui bahwa  $R_1 > R_2, R_3, R_4$  yang berarti  $R^2$  model awal lebih besar dari pada  $R^2$  dari persamaan regresi variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinieritas dalam model penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi

Gejala autokorelasi timbul sebagai akibat adanya korelasi antara variabel observasi yang diurutkan menurut waktu. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan uji Durbin-Watson. Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda pada tabel 4.7 diperoleh nilai  $DW_{hitung} = 1.562425$  dan berdasarkan tabel Durbin-Watson nilai  $d_l$  dan  $d_u$  pada  $\alpha = 5\%$  dengan  $n=16$  dan  $k$  (jumlah variabel independen) = 3 yaitu  $d_l = 0,8572$  dan  $d_u = 1,527$  sehingga didapat:



Gambar 4.2 Uji Durbin-Watson

berdasarkan uji Durbin-Watson menunjukkan bahwa  $DW_{hitung}$  berada pada tidak ada autokorelasi yaitu  $d_l < DW_{hitung} < d_u$  yang berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada estimasi model yang digunakan.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi ketika varian dari residual berlainan atau tidak sama. Salah satu cara dalam mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan uji white. Berikut ini hasil dari uji white:

Tabel 4.10 Uji White  
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.018739	Prob. F(7,8)	0.4836
Obs*R-squared	7.540644	Prob. Chi-Square(7)	0.3748
Scaled explained SS	10.49729	Prob. Chi-Square(7)	0.1621

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan uji White diketahui nilai Obs\*R-squared sebesar 7.540644 dengan nilai probabilitasnya 0.3748 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

## 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.4.1 Pembahasan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan Uji t-statistik dan koefisien pada variabel jumlah penduduk diketahui bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin besar jumlah penduduk maka penerimaan pajak daerah juga akan semakin meningkat. Sehingga hipotesis penelitian ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang ditolak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Liberty (2013) menyatakan bahwa jumlah penduduk berdampak positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa jumlah penduduk juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian Santosa & Rahayu (2005) dan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dimana penerimaan pajak daerah merupakan subsektor dari pendapatan asli daerah.

Tabel 4.11 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang Tahun 2002-2012

No.	Tahun	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
1	2002	51,546	-
2	2003	64,887	25.88
3	2004	57,566	-11.28
4	2005	71,465	24.145
5	2006	56,442	-21.022
6	2007	45,288	-19.76
7	2008	39,399	-13.00
8	2009	42,926	8.95
9	2010	32,175	-25.05
10	2011	26,297	-18.27
11	2012	40,291	53.22
Rata-Rata			34.66

Sumber : SAKERNAS (2013), data diolah

Pengaruh yang tidak signifikan kemungkinan dipengaruhi masih adanya penduduk yang tidak terdaftar sebagai subjek pajak daerah (wajib pajak).

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 4.10 diketahui bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Jombang sangat berfluktuatif. Pengangguran terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 71465 jiwa dan pengangguran terendah terjadi di tahun 2011 yaitu sebesar 26297 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum bisa mengendalikan jumlah pengangguran di Kabupaten Jombang. Pengangguran merupakan mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (BPS, 2010).

Masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tentunya akan berdampak pada menurunnya aktifitas ekonomi sehingga mengakibatkan penurunan perekonomian pada wilayah tersebut. Dalam hal ini peran pemerintah dalam menekan jumlah pengangguran sangat dibutuhkan. Program-program pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat agar mempunyai ketrampilan yang berguna supaya masyarakat dapat melakukan aktifitas ekonomi yang diarahkan untuk berwirausaha. Jika masyarakat yang tidak produktif dapat ditekan, maka subjek pajak daerah akan meningkat. Pada akhirnya hal ini akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

#### 4.4.2 Pembahasan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan uji t-statistik dan koefisien pada variabel PDRB diketahui bahwa variabel PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat maka penerimaan pajak daerah juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Sehingga Hipotesis penelitian kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan di Kabupaten Jombang diterima.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Apip Supriadi (2009) yang berjudul “Determinasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya

Periode Tahun 1994-2005”. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa PDRB mempunyai elastisitas yang positif terhadap pajak daerah. Meningkatnya PDRB menunjukkan adanya peningkatan dalam perekonomian pada daerah tersebut. Meningkatnya perekonomian suatu daerah, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan pada masyarakat menyebabkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak juga meningkat. Sektor-sektor dalam PDRB ada yang berhubungan langsung dengan penerimaan pajak daerah diantaranya hotel dan restoran sehingga dengan meningkatnya PDRB akan meningkatkan sektor-sektor tersebut. Maka dengan meningkatnya PDRB pada sektor-sektor tersebut maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah pada sektor tersebut juga. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susanto (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang Tahun 1998 – 2012”. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa sebagian dari sektor PDRB atas dasar harga konstan berupa Hotel dan Restoran yang memegang peran pajak hotel dan pajak restoran memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian lain yang berkesimpulan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah diantaranya yaitu Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu pada tahun 2005, Hadi Sasana pada tahun 2005, dan Mucholifah pada tahun 2010.

#### 4.4.3 Pembahasan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan uji t hipotesis penelitian ketiga ( $H_3$ ) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah Tahun Sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang. Koefisien pada variabel belanja daerah tahun sebelumnya sebesar 0.237832 yang berarti apabila dalam variabel belanja daerah naik 1% serta variabel yang lain bernilai nol, maka penerimaan pajak daerah akan meningkat sebesar 0.237832%. Hal ini sesuai dengan teori Peacock dan Wiseman yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak

berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Hal ini juga sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Chenery & Syrquin mengatakan pengeluaran pemerintah dalam hal pembangunan prasarana guna melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat akan berdampak pada peningkatan penerimaan pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan Mardiasmo (2004). Pengoptimalan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang juga didalamnya terdapat pajak daerah harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai macam belanja yang dialokasikan oleh pemerintah hendaknya manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar pajak apabila kualitas serta kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan berbagai sarana dan prasarana yang sangat penting guna meningkatkan produktifitas perekonomian lebih diutamakan.

Dalam penelitian Santosa & Rahayu (2005) yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaa Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri” menyatakan bahwa pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa apabila belanja daerah yaitu pengeluaran pembangunan meningkat maka penerimaan PAD diantaranya pajak daerah juga akan meningkat. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Supriadi (2009) yang menyatakan bahwa kosumsi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang. Karena masih terdapatnya pengangguran atau penduduk yang belum produktif di Kabupaten Jombang sehingga subjek pajak daerah belum maksimal serta kemampuan penduduk untuk menyumbangkan pendapatannya terhadap pemerintah daerah melalui pajak juga tidak maksimal.
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang. Karena PDRB merupakan cerminan perkembangan ekonomi di suatu daerah. Semakin meningkat PDRB Atas Dasar Harga Konstan pertahunnya menggambarkan bahwa perkembangan ekonomi semakin baik serta kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah juga semakin meningkat. Beberapa subsektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan berhubungan langsung terhadap pajak daerah yaitu hotel dan restoran. Semakin besar subsektor hotel dan restoran PDRB Atas Dasar Harga Konstan maka penerimaan pajak daerah juga akan semakin besar.
3. Belanja Daerah pada tahun sebelumnya mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang. Karena peningkatan belanja daerah dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, sarana dan prasarana, serta pelayanan publik akan dapat meningkatkan produktifitas para pelaku ekonomi. Meningkatnya produktifitas perekonomian akan berdampak pada meningkatnya perekonomian daerah dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak daerah akan meningkat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jombang yang meliputi akurasi data subjek dan objek pajak. Sehingga subjek dan objek pajak yang seharusnya terdaftar sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak bisa terdaftar sebagai wajib pajak.
2. Meningkatkan beberapa sektor yang dominan dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan salah satunya adalah hotel dan restoran. Sehingga para investor tertarik untuk membangun usaha di Kabupaten Jombang termasuk usaha perhotelan dan restoran.
3. Meningkatkan alokasi belanja daerah dalam hal peningkatan fasilitas dan layanan publik yang berguna untuk meningkatkan produktifitas masyarakat di Kabupaten Jombang.
4. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu diperhatikan penentuan target berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang serta pemberian sanksi dan penghargaan kepada pemungut dan pembayar pajak atas prestasi yang diberikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembanguna dan Pendapatan Asli Daerah, studi Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali*. Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Ariefianto, Mochamad Doddy. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Brotodiharjo, Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco Bandung.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Jombang Dalam Angka berbagai Edisi*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang.
- Badan Pusat Statistik. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka berbagai Edisi*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2013.
- Fauzi, Achmad & Iskandar. 1995. *Cara Membaca APBN*. Malang: Brawijaya Univercity Press.
- Gunawan, Anton Hermanto. 1991. *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Gujarati, Damodar. 1978. *Ekonometrika Dasar*. Alih bahasa oleh Sumarno Zain. 2002. Jakarta: Erlangga.
- Hamrolie, Harun. 2004. *Analisis Peningkatan PAD*. Yogyakarta: BPFE.
- Insukindro. 1984. *Ekonomi Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE.
- Jhingan, ML. 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

- Liberty, Setia Neo. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Jember*. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Jember.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1991. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2010. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: PEE- Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Optimalisasi Belanja Modal*. Jakarta: Erlangga.
- Maski, Ghozali. 2007. *Transmisi Kebijakan Moneter: Kajian Teoritis dan Empiris*. Malang: BPFE-UB.
- Muchtolifah. 2010. *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto*. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan, Vol.1 No.1 Januari 2010, FE-UPNV. Jatim.
- Munawir, Slamet. 2001. *Dasar-dasar Perpajakan*. Edisi V Jakarta: Erlangga.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Sabatini, Rifqy & Purwati, Evie Yulia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang*. Jurnal Ekonomi, Vol.1 No.1 hal 1-7, FE-UNDIP.
- Samudra, A. Ashari. 1995. *Perpajakan di Indonesia (Keuangan Pajak dan Retribusi)*. Cetakan I, Jakarta: Gramedia.
- Samuelson, Paul A & Nordhaus, William D. 1985. *Economics, 12<sup>th</sup> Edition*. Alih bahasa oleh Jaka Wasaana M. 1994. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, Purbayu Budi & Rahayu, Retno Puji. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Dinamika Pembangunan Vol.2 No.1 Juli 2005 hal 9-18.

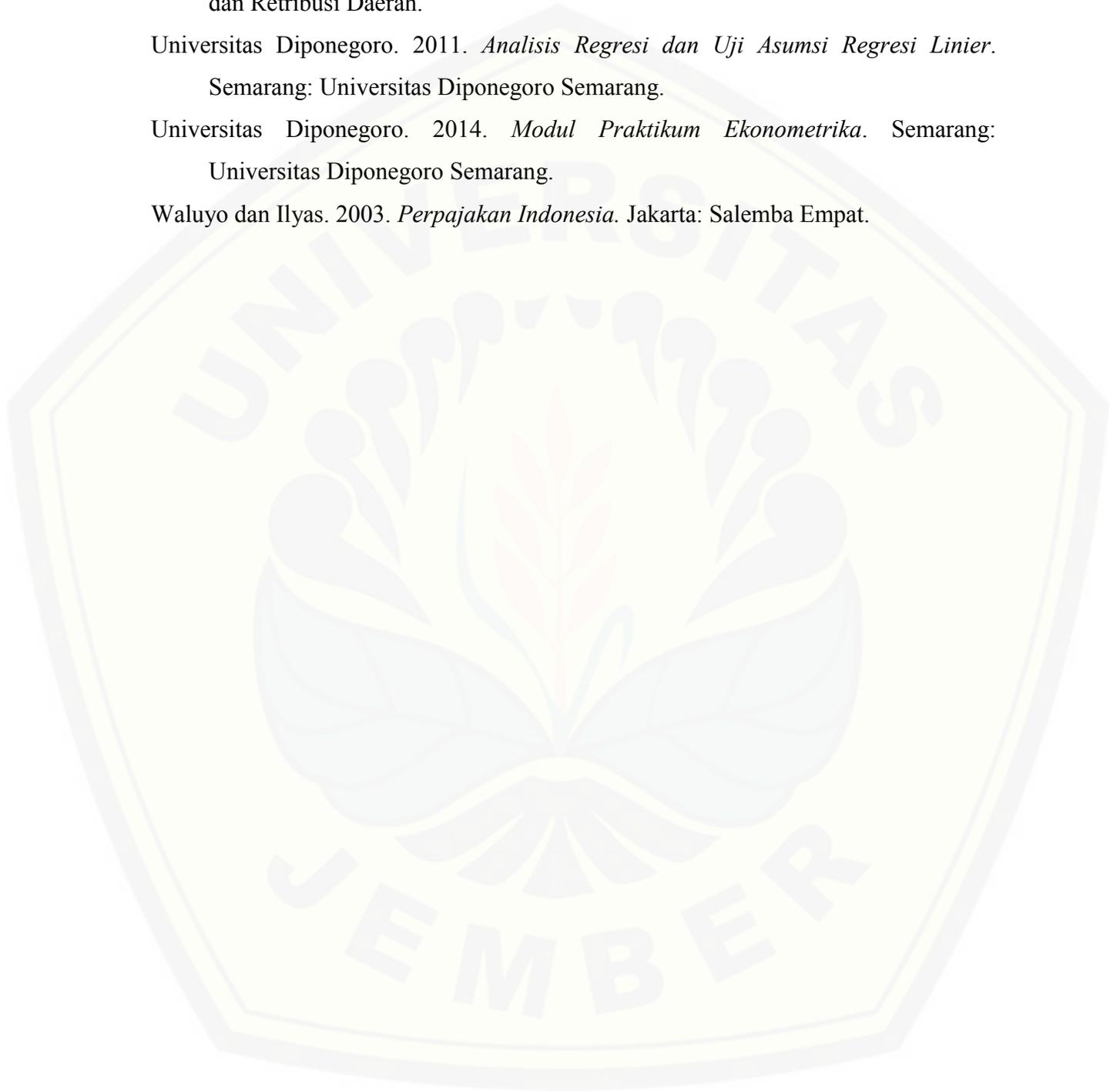
- Saprudin. 2011. *Analisis Pengaruh Upaya Pajak (Tax Effort), Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah Di Kabupaten Indramayu Periode 1998–2008*. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Bandung: Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pasundan.
- Sasana, Hadi. 2005. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*. *Dinamika Pembangunan* Vol.2 No.1 Juli 2005 hal 19-29.
- Singarimbun, N & Sofyan, E. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LPFE-UI
- Sudantoko, Djoko H. 2003. *Dilema Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*. Jakarta: LPFE-UI & Bima Grafika.
- Supranto, J. 2005. *Ekonometrika*. Jakarta: LPFE UI.
- Supriadi, Apip. 2009. *Determinasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tasikalaya Periode Tahun 1994-2005*. *Jurnal Ekonomi*, Vol.4 No.1. FE UNSIL. ISSN: 1907-9958 hal 529-535.
- Susanto, Iwan. 2014. *Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998-2012)*. Tidak Diterbitkan. *Jurnal Ilmiah*. Malang: Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Universitas Diponegoro. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Asumsi Regresi Linier*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Universitas Diponegoro. 2014. *Modul Praktikum Ekonometrika*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Waluyo dan Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran 1**

**Hasil Analisis Model Regresi**

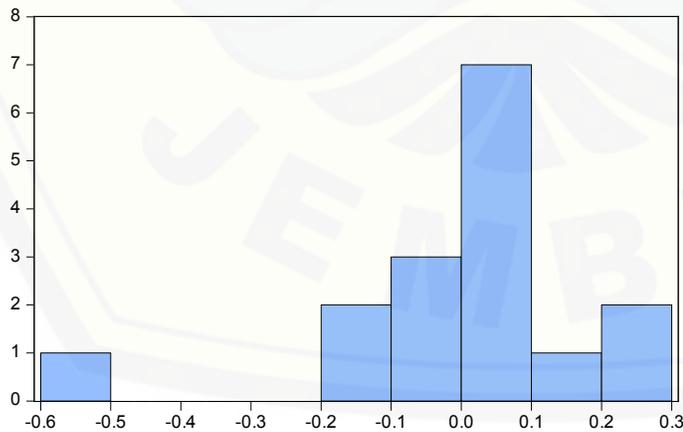
Dependent Variable: LNY  
 Method: Least Squares  
 Date: 04/18/15 Time: 08:13  
 Sample: 1998 2013  
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-35.77019	32.72522	-1.093047	0.2958
LNx1	1.228175	2.431696	0.505070	0.6227
LNx2	1.951395	0.491122	3.973342	0.0018
LNx3	0.237832	0.104242	2.281531	0.0416

R-squared	0.957629	Mean dependent var	16.15587
Adjusted R-squared	0.947036	S.D. dependent var	0.834581
S.E. of regression	0.192069	Akaike info criterion	-0.249602
Sum squared resid	0.442688	Schwarz criterion	-0.056455
Log likelihood	5.996815	Hannan-Quinn criter.	-0.239711
F-statistic	90.40402	Durbin-Watson stat	1.562425
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Hasil Uji Normalitas**



Series: Residuals	
Sample 1998 2013	
Observations 16	
Mean	1.11e-14
Median	0.023176
Maximum	0.241936
Minimum	-0.505529
Std. Dev.	0.171792
Skewness	-1.406432
Kurtosis	5.949671
Jarque-Bera	11.07518
Probability	0.003936

**Lampiran 2****Hasil Uji Multikolinieritas (Auxiliary Regression)**

Dependent Variable: LNX1  
 Method: Least Squares  
 Date: 03/04/15 Time: 23:14  
 Sample: 1998 2013  
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.08819	0.645235	20.28437	0.0000
LNX2	0.027020	0.053895	0.501350	0.6245
LNX3	0.024320	0.010887	2.233783	0.0437
R-squared	0.746204	Mean dependent var		13.98539
Adjusted R-squared	0.707158	S.D. dependent var		0.040693
S.E. of regression	0.022021	Akaike info criterion		-4.626288
Sum squared resid	0.006304	Schwarz criterion		-4.481428
Log likelihood	40.01030	Hannan-Quinn criter.		-4.618870
F-statistic	19.11107	Durbin-Watson stat		1.331301
Prob(F-statistic)	0.000135			

Dependent Variable: LNX2  
 Method: Least Squares  
 Date: 04/18/15 Time: 08:12  
 Sample: 1998 2013  
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.559685	18.41640	0.301888	0.7675
LNX1	0.496164	1.366334	0.363135	0.7223
LNX3	0.150793	0.041429	3.639785	0.0030
R-squared	0.826054	Mean dependent var		15.43462
Adjusted R-squared	0.799293	S.D. dependent var		0.242112
S.E. of regression	0.108467	Akaike info criterion		-1.437382
Sum squared resid	0.152946	Schwarz criterion		-1.292521
Log likelihood	14.49906	Hannan-Quinn criter.		-1.429964
F-statistic	30.86789	Durbin-Watson stat		0.338919
Prob(F-statistic)	0.000012			

Dependent Variable: LNX3  
 Method: Least Squares  
 Date: 04/18/15 Time: 08:13  
 Sample: 1998 2013  
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-206.3100	65.62788	-3.143634	0.0078
LNX1	12.44999	5.471358	2.275484	0.0405
LNX2	3.347136	0.919597	3.639785	0.0030
R-squared	0.874339	Mean dependent var		19.46968
Adjusted R-squared	0.855007	S.D. dependent var		1.342054
S.E. of regression	0.511026	Akaike info criterion		1.662570
Sum squared resid	3.394925	Schwarz criterion		1.807430
Log likelihood	-10.30056	Hannan-Quinn criter.		1.669988
F-statistic	45.22662	Durbin-Watson stat		0.806518
Prob(F-statistic)	0.000001			

**Lampiran 3****Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.018739	Prob. F(7,8)	0.4836
Obs*R-squared	7.540644	Prob. Chi-Square(7)	0.3748
Scaled explained SS	10.49729	Prob. Chi-Square(7)	0.1621

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/18/15 Time: 08:11

Sample: 1998 2013

Included observations: 16

Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	854.8372	708.1260	1.207182	0.2618
LNx1	-84.65684	73.27329	-1.155358	0.2813
LNx1*LNx2	3.901417	4.366271	0.893535	0.3977
LNx1*LNx3	1.190216	2.240366	0.531260	0.6097
LNx2^2	-2.321039	2.412747	-0.961990	0.3642
LNx2*LNx3	0.867203	0.801111	1.082501	0.3106
LNx3	-25.98628	25.61653	-1.014434	0.3401
LNx3^2	-0.102447	0.066480	-1.541018	0.1619

R-squared	0.471290	Mean dependent var	0.027668
Adjusted R-squared	0.008669	S.D. dependent var	0.063574
S.E. of regression	0.063298	Akaike info criterion	-2.375075
Sum squared resid	0.032053	Schwarz criterion	-1.988781
Log likelihood	27.00060	Hannan-Quinn criter.	-2.355294
F-statistic	1.018739	Durbin-Watson stat	2.467434
Prob(F-statistic)	0.483619		

## Lampiran 4

## Data Penelitian

<b>Pajak Daerah (Ribu Rp)</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	<b>PDRB ADHK 2000 (Ribu Rp)</b>	<b>Belanja Daerah Tahun Sebelumnya (Ribu Rp)</b>
3,222,161	1,114,150	3,814,070.79	19,664,581.00
3,150,746	1,121,721	3,711,738.18	22,201,264.00
2,502,988	1,129,027	3,825,514.17	75,478,623.00
4,325,580	1,135,285	3,952,998.85	81,138,464.00
6,169,140	1,148,336	4,109,738.16	198,832,670.00
8,831,750	1,155,449	4,311,449.12	217,438,950.00
10,446,400	1,176,266	4,531,339.96	269,835,080.00
11,097,760	1,199,958	4,773,509.61	364,657,200.00
12,081,644	1,212,876	5,047,094.89	412,229,228.00
14,171,544	1,233,279	5,353,300.63	490,976,697.00
15,642,629	1,285,739	5,663,243.59	700,783,059.78
17,784,229	1,195,940	5,962,262.39	835,844,210.10
19,023,023	1,205,114	6,327,278.13	924,017,847.67
24,705,170	1,212,881	6,759,495.41	1,001,954,919.16
31,887,921	1,220,404	7,230,304.36	1,143,438,346.87
36,927,594	1,230,881	7,695,631.33	1,363,382,391.75

**Lampiran 5****Hasil Data Logaritma**

<b>Pajak Daerah</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>PDRB ADHK 2000</b>	<b>Belanja Daerah Tahun Sebelumnya</b>
14.9855628	13.923602	15.15420762	16.79432966
14.9631497	13.930375	15.12701084	16.91565978
14.7329958	13.936867	15.15720344	18.13936004
15.2800568	13.942394	15.18998505	18.21166769
15.63507	13.953824	15.22886988	19.10797417
15.9938637	13.96	15.27678463	19.19742868
16.161768	13.977856	15.32652825	19.41332152
16.2222538	13.997797	15.37859236	19.71446829
16.3071978	14.008505	15.43432337	19.83709013
16.4667466	14.025187	15.49322387	20.01190722
16.5655104	14.066844	15.54950736	20.36770892
16.6938226	13.994443	15.60096056	20.5439528
16.7611605	14.002085	15.66038071	20.64424195
17.0225231	14.008509	15.7264588	20.72521885
17.2777378	14.014693	15.79379169	20.85730565
17.4244696	14.023241	15.85616337	21.0332345